

## **BAB IV**

### **FUNGSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

#### **Pengenalan**

Bab ini membahas tentang bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjalankan fungsi partai secara umum, sama ada fungsi agregasi, pendidikan, artikulasi maupun rekrutmen. Dalam fungsi agregasi dijelaskan bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dijadikan sebagai instrument bagi transformasi sosial pesantren serta strategi dan sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap pesantren. Fungsi pendidikan menjelaskan posisi pesantren sebagai institusi pendidikan dan politik di mana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan agen pengenalan politik bagi pesantren. Sementara itu fungsi artikulasi menjelaskan strategi dan peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam membangun pemberdayaan ekonomi, sedangkan fungsi rekrutmen adalah bagaimana proses dan sistem perekrutan warga pesantren dalam membangun kekuatan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) khususnya di Provinsi Lampung, Indonesia.

#### **Fungsi Utama Partai Politik**

Fungsi utama partai politik seperti telah digambarkan dalam kerangka teoritik antara lain adalah fungsi agregasi, pendidikan, artikulasi dan fungsi rekrutmen.<sup>1</sup> Kalau fungsi ini diperluas lagi, maka partai politik memiliki fungsi elektorat, organisasi dan fungsi di pemerintahan.<sup>2</sup> Pada masing-masing bahagian itu, partai politik memiliki

---

<sup>1</sup> Lihat bagian pendahuluan dari karya ini yang menggambarkan tentang kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini.

<sup>2</sup> Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011, hlm. 15-20.

peranan yang kompleks. Fungsi parti dalam proses elektorat dimaksudkan untuk menghubungkan individu dengan demokrasi. Sejatinya, pilihan raya umum (PEMILU) tak lain adalah momentum penting menampilkan perkhidmatan kerajaan yang lebih bersih serta aspiratif terhadap kepentingan rakyat.<sup>3</sup> Di sini, parti berfungsi untuk menyederhanakan pilihan bagi pemilih, memberikan pendidikan warga negara, membangkitkan simbol identifikasi dan loyaliti serta melakukan mobilisasi kepada rakyat untuk berpartisipasi.

Sementara fungsi parti sebagai organisasi, merujuk pada fungsi yang melibatkan parti sebagai organisasi politik, atau kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Parti disini memiliki peran untuk melakukan rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari pegawai kerajaan, pelatihan elit politik, pengartikulasian kepentingan politik dan agregasi kepentingan.<sup>4</sup>

Yang berikutnya ialah fungsi parti didalam kerajaan bererti parti melakukan pengelolaan dan penstrukturan persoalan kerajaan.<sup>5</sup> Ada banyak fungsi parti dalam konteks ini. Parti politik misalnya dituntut untuk menjadi majoriti, menyusun pemerintahan, menerapkan kebijakan, mengorganisasikan ketidaksepakatan, menjamin tanggungjawab tindakan kerajaan, melakukan kawalan terhadap perkhidmatan kerajaan dan memperkuat stabiliti pemerintahan.

Tidak hanya sebagai institusi politik, tetapi parti politik sesungguhnya juga adalah institusi sosial dalam pengertian luasnya. Parti politik merupakan institusi

---

<sup>3</sup> Abu Yasid, *Fiqh Today, Fatwa Tradisional untuk Orang Modern, Buku Dua: Fikih Politik*, Jakarta: Erlangga, 2002, hlm. 6.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

sosial yang peran dan fungsinya khas dalam spektrum politik. Namun, bangunan dasarnya partai politik ini sesungguhnya adalah lembaga sosial yang memiliki peran-peran kemasyarakatan secara umum, tidak hanya politik.<sup>6</sup> Diantara fungsi-fungsi di atas, fungsi artikulasi dan agregasi yang dapat kita kategorikan sebagai fungsi sosial partai politik. Dalam praktiknya, implementasi fungsi sosial dari partai politik tentu akan sangat berkaitan dengan karakter, ideologi serta kelompok mana yang disasar oleh partai politik itu sendiri.

Sebagai partai politik yang menyatakan dirinya sebagai wakil pesantren, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentu memiliki karakter tersendiri dalam menjalankan fungsi sosialnya itu. Pesantren, sebagaimana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), juga adalah institusi sosial.<sup>7</sup> Pesantren adalah institusi sosial yang menjaga ritme pendidikan Islam tradisional. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan institusi sosial yang berada di garis politik. Pesantren memiliki mandat untuk melakukan perubahan sosial atau memberi pengaruh pada lingkungan sosialnya. Fungsi itu yang kemudian diemban Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wakil pesantren di dunia politik. Maka dari itu, bahagian ini hendak menggambarkan tentang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai instrumen transformasi sosial pesantren serta bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan sosialisasi politik bagi warga pesantren, baik strategi maupun polanya.

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994, hlm. 2-3.

## **Fungsi Agregasi: PKB sebagai Instrumen Transformasi Sosial Pesantren**

Sebelum penulis menggambarkan tentang peranan sosial PKB terhadap pesantren maka perlu untuk memahami cara PKB dan pesantren melakukan adaptasi dengan lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini adalah masyarakat yang berada di Provinsi Lampung. Meski ada bahagian-bahagian tertentu yang menjadi piawian atau standar, baik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mahupun Pesantren, tetapi cara memasarkan ideologi politik (baca: PKB) mahupun ideologi keagamaan (baca: pesantren) tentu mesti memperhatikan keadaan tempat mereka berkembang.<sup>8</sup>

Dilihat dari kemunculannya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah institusi yang hadir belakangan berbanding pesantren. Tapi, pesantren itu sendiri juga tidak hadir di ruang hampa. Ada masyarakat yang kewujudannya, mendahului pesantren. Dalam konteks masyarakat Lampung, pesantren sangat identik dengan pola pendidikan yang diadopsi dari Pulau Jawa. Dilihat dari keseluruhan elemen yang ada di pesantren menunjukkan situasi demikian.

Dengan demikian, ada tiga elemen yang satu dan lainnya saling berhubung kait secara erat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pesantren dan masyarakat. Sebagai produk “luar”, maka pelebagaan pesantren dimasyarakat Lampung memiliki dinamika yang khas. Ini yang membezakannya dengan pesantren yang ada di Jawa. Kerana latar belakang kemunculan pesantren di Lampung ada dalam konteks yang spesifik, maka implementasi peranan dan fungsi (PKB) sebagai agen transformasi sosial juga memerlukan strategi yang khas pula.

---

<sup>8</sup> Tentang pentingnya memasarkan ide-ide politik bisa disimak dalam Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 83-86.



**Rajah 4.1:** Hubungan antara PKB, Pesantren dan Masyarakat

Dalam praktik berpolitik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah boleh dipastikan menghendaki adanya sokongan penuh dari pesantren.<sup>9</sup> Pesantren adalah masyarakat politik utama yang menjadi basis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tetapi sesungguhnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki basis lain selain pesantren. Bahawa pesantren adalah komuniti inti dalam proses-proses elektoral Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tetapi pesantren sesungguhnya hanya salah satu bahagian sahaja dari masyarakat secara umum.

Massa yang utama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah pasti tidak hanya dari kalangan pesantren sahaja. Seperti yang dituturkan Musa Zainuddin, bahawa ia tidak hanya berhenti di pesantren sahaja untuk mendulang suara. Ada elemen lain yang juga ikut dimanfaatkan untuk menyokong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menyebut misalnya sering terlibat dan ikut dalam proses pertukaran kepimpinan di lingkungan fakulti di sebuah universiti awam di

<sup>9</sup> Temu bual Musa Zainuddin, 20 September 2013

Lampung.<sup>10</sup> Ini juga bahagian dari upaya untuk menebar jejaring yang lebih luas di masyarakat. Kelompok-kelompok akademik serta birokrat, dengan demikian menjadi elemen yang cukup diperhitungkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kes lain misalnya ditunjukkan Okta Rijaya, setiausaha DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung. Ia mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana ia hadir. Ketika berkumpul dengan para pemuda misalnya, maka Okta akan tampil seperti anak muda.<sup>11</sup> Performa yang ia tunjukkan itu adalah cara untuk menunjukkan bahawa untuk menjadi bahagian dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), seseorang tidak mesti berlatar belakang pesantren. Ideologi pesantren dan bukan pesantren menurutnya boleh berjalan beriringan tanpa mesti ada pendikotomian.

Selari dengan Okta, Amin Thohari mengungkapkan hal yang sama soal strategi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjangkau kelompok muda. Dia misalnya menyumbang peralatan sukan untuk para belia di luar pesantren. Belia yang tergabung dengan organisasi Karang Taruna juga dilibatkan dalam aktiviti perlumbaan sukan atau memancing. Bagi Amin, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mesti melakukan strategi tersebut, kerana konteksnya adalah masyarakat Lampung. Meskipun di wilayahnya (Lampung Timur, red) banyak berdiri pesantren, tetapi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak boleh hanya berhenti di pesantren sahaja. Qudratullah Shodiq melakukan hal yang sama, memperluas jangkauan dengan menggaet kalangan profesional, praktisi dan pendidikan dan ekonomi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Temu bual Okta Rijaya, 23 Maret 2013.

<sup>12</sup> Temu bual Qudratullah Shodiq, 21 September 2013.

Meskipun demikian, dalam konteks masyarakat yang menjadi sasaran suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesungguhnya sangatlah terhad. Apa yang dilakukan oleh Musa dengan menggaet kalangan akademik mahupun pentadbiran, boleh dikatakan sangatlah kasuistik sifatnya.<sup>13</sup> Tidak semua politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bisa menembus elemen non-pesantren, non-NU (struktural) apatah lagi non muslim. Disini, keterbukaan ideologi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar parti masih belum dapat dijadikan sebagai alat berkempen. Aktivis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya belum berani untuk tetap menjaga basis inti dengan membuka peluang untuk mencari sokongan massa dari pihak lain, seperti kalangan bukan Islam.

Musa mengakui sendiri hal itu dengan mengatakan;

“Sebenarnya (berelasi dengan kalangan bukan muslim) itu nyaman, hanya saja saya khawatir ini kontraproduktif. Saya dulu juga dekat dengan non muslim. Tapi kalau ini diserang oleh kiai, nah itu saja yang saya khawatirkan. Sampai sekarang ini, orang Tionghoa tidak bisa menjalankan perayaan Baronsai kalau tanpa ada bantuan dari PKB dan Gus Dur sampai mengeluarkan Keppres.<sup>14</sup> Pertanyaannya ada tidak orang Tionghoa yang memilih PKB sekarang ini? Kan di Jawa menyebutkan bahwa Lampung itu Jawa Timurnya luar Jawa, artinya luar jawa yang NU itu ya Lampung, makanya ini harus tetap aman jangan sampai ada kontraproduktif dengan berkreasi dengan non NU dan kelompok agama”.<sup>15</sup>

Pernyataan Musa di atas menunjukkan kebimbangan antara idealisme dengan kenyataan bahawa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum dapat benar-benar menjadi parti terbuka dalam pengertian yang sesungguhnya. Kekhawatiran akan munculnya pertentangan dari warga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di

---

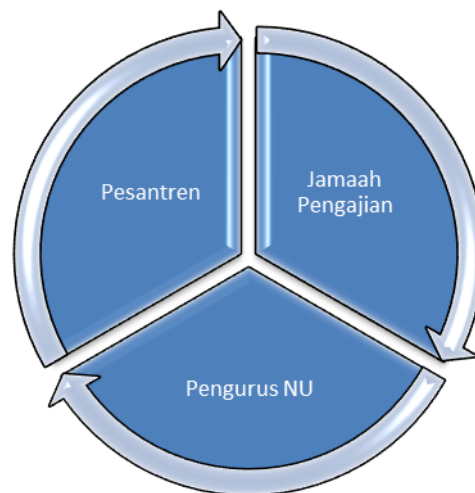
<sup>13</sup> Temu bual Musa Zainuddin, 20 September 2013.

<sup>14</sup> Maksudnya adalah Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2000 tentang pencabutan larangan untuk merayakan aktivitas kebudayaan dan keagamaan bagi warga Tionghoa.

<sup>15</sup> Temu bual Musa Zainuddin.

lapisan akar umbi atau level grass root menunjukkan bahawa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesungguhnya sangat *segmented* dalam hal ini. Ini ertinya, kedekatan antara elit-elit PKB dengan kelompok bukan Islam hanya dalam konteks individu, tidak dapat ditransformasikan dalam panggung politik.<sup>16</sup>

Dengan bercermin pada strategi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjangkau masyarakat maka kita dapat memetakan simpul masyarakat yang menjadi kekuatan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini boleh dilihat dalam rajah 3.2 di bawah.



**Rajah 4.2:** Basis Tradisional-Ideologis PKB

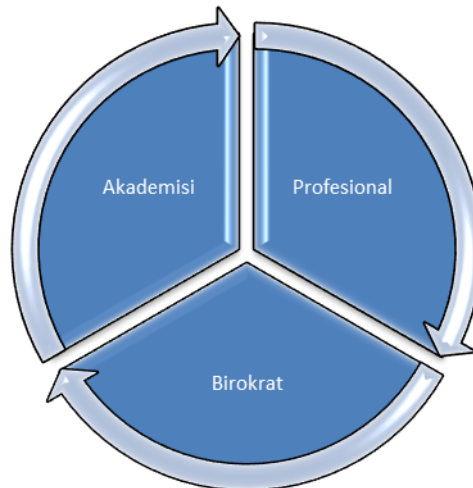
Dalam rajah 3.2 tersebut, kita dapat membaca bahawa akar sejarah menempatkan kalangan pesantren dan Nahdliyyin sebagai penyokong tradisional Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara kalangan jemaah pengajian sesungguhnya tidak dapat dikatakan sebagai penyokong dalam pengertian sistemik.

---

<sup>16</sup> Ibid.



Secara amnya, mereka mengidentifikasi sebagai pengamal ahlussunnah wal jamaah, tetapi tidak selalu mengakui dirinya sebagai orang NU.<sup>17</sup>



**Rajah 4.3:** Penyokong PKB Non-Ideologis

Jadi dilihat dari dikotomi pesantren dan non-pesantren, maka pengurus NU dan jemaah pengajian masuk dalam kategori kelompok non pesantren. Meski ada daerah arsiran sebenarnya disini, kerana ada pengurus NU yang memiliki pesantren dan ada yang tidak. Banyak pengurus NU yang pernah belajar di pesantren (nyantri) akan tetapi tak sedikit juga pengurus NU yang bukan berlatar belakang pendidikan di pesantren.<sup>18</sup>

Kalangan pesantren mahupun pengurus NU struktural memiliki cara yang berbeza dalam menunjukkan sokongannya pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sokongan pesantren pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan sangat ditentukan

<sup>17</sup> Temu bual Okta Rijaya.

<sup>18</sup> Temu Bual Musa Zainuddin.

oleh suara kiai. Kiai yang akan mengarahkan seluruh elemen di pesantren untuk menentukan pilihan. Tapi ekspresi sokongan pesantren terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibatasi oleh “etika pesantren”. Keterbukaan pesantren dalam menyokong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selalu diikuti dengan upaya untuk menunjukkan independensi pesantren. Seolah-olah independen, tetapi sesungguhnya berpihak. Ini misalnya ditunjukkan oleh Laily Masyithoh;

“Pada dasarnya pondok pesantren itu tidak berpolitik. Kalau ada yang terlibat dalam urusan politik, itu lebih pada individunya. Mereka berpolitik dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Tetapi pesantrennya sendiri sesungguhnya independen”.<sup>19</sup>

Apa yang dilakukan oleh pesantren dalam mengekspresikan sokongannya kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tentu berbeza dengan pengurus NU. Pengurus NU yang menyokong PKB dibatasi oleh etika organisasi. Meski NU membidani kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tetapi secara organisasi NU bukanlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bingkai ini adalah etika yang dipegang oleh pengurus NU.<sup>20</sup>

Berbeza halnya dengan peta yang ada di pengurus NU atau pesantren, yang relatif memiliki hubungan ideologi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), peta sokongan terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kalangan jemaah pengajian yang sedikit berbeza. Masyarakat yang hadir dalam pengajian, meski mendatangkan ustaz atau muballigh dari kalangan NU, tidak dapat diidentifikasi bahawa jemaah ini adalah warga NU.<sup>21</sup> Tentang jemaah seperti ini, Okta mengatakan

---

<sup>19</sup> Temu bual Laily Masyithoh, 22 September 2013.

<sup>20</sup> Temu bual KH. Ngaliman Marzuqi, 9 Mei 2013.

<sup>21</sup> Ibid.

“Mereka yang datang ke pengajian pun tidak bisa dikategorikan sebagai jamaah NU, hanya mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun amaliyahnya seperti orang NU, mereka tidak mau disebut NU, juga tidak mau disebut Muhammadiyah. Pokoknya Islam”.<sup>22</sup>

Bila dibandingkan dengan dua elemen lain di basis tradisional Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mungkin jamaah pengajian ini yang paling susah dipetakan. Padahal, mereka ini yang sesungguhnya cukup banyak. Proses ideologisasi terhadap kelompok ini relatif lebih susah kerana mereka tidak hanya “diasuh” oleh satu kiai. Beza halnya dengan murid tarekat. Ratusan ribu murid tarekat KH. Ahmad Shodiq di Way Jepara, Lampung Timur akan sangat taat dan patuh kepada pimpinannya. Hanya sahaja, Kiai Shodiq tidak secara langsung melibatkan diri dalam hiruk pikuk politik, kecuali putera-puteranya.<sup>23</sup>

Dalam Rajah 3 kita melihat ada peta mengenai penyokong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) non ideologi. Hampir dapat dipastikan mereka yang ada dalam jajaran ini tidak memiliki jumlah yang signifikan. Mahrus As’ad, pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro mengatakan bahawa bagi masyarakat asli Lampung kehadiran NU sangat terasa ketika ia menjadi parti politik.<sup>24</sup> Ketika menjadi parti politik, ada kepentingan yang boleh ditawarkan. Parti politik mampu menjadi kanal bagi kepentingan mereka. Ketika terjadi fusi pada tahun 1973, dan diikuti dengan penarikan NU dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), NU menjadi tidak menarik bagi orang Lampung. Ketika NU itu berjuang secara budaya, mereka yang berasal dari Jawa itu yang secara sabar dan teliti kemudian mengurus NU sampai era reformasi. Ketika NU

---

<sup>22</sup> Temu bual Okta Rijaya.

<sup>23</sup> Temu Bual Ahmad Syarief Kurniawan, 22 September 2013

<sup>24</sup> Temu bual Mahrus As’ad, 21 September 2013.

menubuhkan PKB, orang NU yang sabar dan inilani teliti yang diberi peluang untuk berkiprah di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jadi kalau Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu identik dengan Jawa, maka itu sangat dapat difahami.<sup>25</sup>

Untuk melihat bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi instrumen transformasi sosial pesantren, maka perlu dicermati hubungan antara pesantren dengan masyarakat. Penggambaran elemen utama pesantren iaitu kiai dalam hubungannya dengan masyarakat akan membantu melihat posisi pesantren di tengah-tengah masyarakat. Kajian yang dilakukan oleh Clifford Geertz menyimpulkan bahawa di Jawa kiai memiliki peran sebagai agen budaya atau *cultural broker*.<sup>26</sup> Kiai berperan sebagai penghubung antara dunia luar dengan dunia dalam pesantren. Ianya menyaring budaya yang tidak sesuai dengan dunia pesantren. Tetapi arus teknologi maklumat menyebabkan peran tersebut susah dilakukan. Akibatnya, peran kiai tak lagi signifikan.

Tetapi Hiroko Horikoshi kemudian membantah tesis Geertz tentang peran kiai ini. Menurut Horikoshi, dengan bercermin pada kes sosok ajengan (kiai) di Jawa Barat, kiai justru dapat berperan dalam proses perubahan sosial.<sup>27</sup> Ia membuat perubahan sosial dengan cara yang khas. Kiai tidak menapis maklumat, tapi menawarkan agenda perubahan yang sesuai dengan keperluan masyarakat.

Pradjarta Dirdjosanjoto kemudian membuat penelitian yang kesimpulannya mendayung di antara karya Geertz dan Horikoshi. Pradjarta tidak menolak

---

<sup>25</sup> Temu bual Mahrus As'ad.

<sup>26</sup> Clifford Geertz, *The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker*, *Comparative Studies in Society and History*, 1959-1960, hlm.243

<sup>27</sup> Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1984.

bahawa dalam satu ketika kiai berperan sebagai *cultural broker* dan juga agen perubahan sosial.<sup>28</sup> Menurutnya, perlu dibedakan antara kiai surau, kiai pesantren dan kiai tarekat. Kiai surau merupakan pemimpin komuniti tempatan di kawasan surau. Otoritinya didasarkan pada penerimaan dari dan hubungan dengan, komuniti tempatan yang mereka pimpin. Kiai pesantren dapat dilihat sebagai kiai supralokal yang memiliki santri dan pengikut dari pelbagai tempat yang luas. Melalui jaringan transmisi ilmu, para kiai pesantren membangun hubungannya dengan kiai-kiai di pesantren lain. Hubungan ini dapat dikatakan juga sebagai mekanisme untuk mempertahankan eksklusiviti kiai. Sementara kiai tarekat adalah kiai yang memimpin tarekat sebagai kelompok yang boleh dikatakan eksklusif.

Kompleksitas peran kiai dan pesantren di masyarakat Jawa tentunya sangat berkait rapat dengan kewujudan institusi itu yang sudah sangat mendarah daging dalam masyarakat Jawa. Situasi ini tentu berbeza dengan Lampung. Setidaknya penulis mencatat ada dua faktor pembeza itu. *Pertama*, dilihat dari waktunya, pesantren belum lama berdiri di Lampung. *Kedua*, masyarakat yang ada di sekitar pesantren cenderung heterogen. Hal inilah yang pada nantinya membuat pengaruh pesantren terhadap lingkungan sekitarnya berbeza dengan pesantren di Jawa.<sup>29</sup>

Ketika hal ini dipastikan, KH. Ngaliman Marzuki mengatakan pesantren di Lampung tidak memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya.<sup>30</sup> Jika adapun kekuatan itu sangat terhad dan lebih banyak ditentukan

---

<sup>28</sup> Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*, Yogyakarta: LKiS, 2013, hlm. 275-276.

<sup>29</sup> Temu bual KH. Ngaliman Marzuqi, 9 Mei 2013.

<sup>30</sup> Ibid.

oleh kemampuan kiai dalam membangun komunikasi secara intensif. Kiai Ngaliman menambahkan bahawa di Jawa, masyarakat dengan pesantren seakan sudah menyatu dalam erti masyarakat tidak dapat lepas dengan pesantren. Sementara di Lampung, masyarakat masih sangat awam dengan pesantren. Itu dapat dibuktikan dengan peratusan kiai dan wali santri di Lampung yang 90 peratus diantaranya adalah orang Jawa. Ini tentu sahaja disebabkan kerana orang Jawa sudah mengenali pesantren, sementara orang Lampung sendiri belum mengenali pesantren.

KH. Baedlowi menuturkan secara formal apa yang diajarkan di Lampung sesungguhnya ia sama halnya dengan apa yang diajarkan di pondok pesantren Jawa. Umnya, orang-orang yang bergerak di lingkungan pesantren berasal dari Jawa. Kata Kiai Baedlowi;

“Yang tidak dari Jawa sangat minim, kayaknya 1 % ada atau tidak, pertama para pengasuhnya juga dari Jawa, yang kedua belajarnya juga dari Jawa, barang tentu pengaruh dari Jawa pun terbawa, jadi sistem yang ada itu ya berangkat dari sana, mungkin apa yang disampaikan agak berbeda mengenai lingkungan”.<sup>31</sup>

Negosiasi dengan lingkungan dimana pesantren itu berkembang adalah keperluan praktis pengurus pesantren. Kiai Baedlowi menceritakan pengalamannya membangun pesantren. Sedar bahawa pesantren harus dapat menjawab keperluan masyarakat sekitar, ianya kemudian mencuba merangkul masyarakat di sekitar, terutamanya tokoh kampung agar mendesain pesantren yang dapat memenuhi keperluan masyarakat.<sup>32</sup> Salah satu usulan masyarakat adalah mendirikan pondok pesantren plus. Tidak hanya Bahasa Arab sahaja yang

---

<sup>31</sup> Temu bual KH. Baedlowi, 22 September 2013.

<sup>32</sup> Ibid.

diajarkan akan tetapi juga Bahasa Inggris. Berbeza dengan pesantren salaf yang bertumpu dengan model bandongan dan sorogan pesantren tersebut juga mengembangkan kemampuan santri dalam berbahasa. Ini sekaligus menjawab tuntutan perkembangan zaman.

Kemampuan kiai di Lampung untuk mempengaruhi masyarakat, seperti disinggung di atas, berbeza dengan di Jawa. Aspek heterogeniti adalah hal yang utama selain masalah waktu dan kehadiran pesantren di Lampung. KH. Muchtar Ghozali mengatakan bahawa di Jawa, pesantren dirintis sejak lama, menurutnya;

“Di Jawa dengan di Lampung ada perbezaan. Di Jawa, pesantren sudah dalam dirintis. Dan para pendiri pesantren itu menjadi pemimpin daerah tersebut. Kalau di Lampung berbeda, meski juga secara umum seperti itu. Di Lampung itu sudah ada masyarakatnya, lalu kemudian baru ada kiainya. Kenapa demikian? Karena kebanyakan pendatang, transmigran. Kemudian juga ada yang sebagian kecil jadi cikal bakal daerah dan barangkali agama dalam arti yang lebih khusus ada hubungan emosional antara kiai dengan masyarakatnya. Dan itupun juga kondisional, terkadang tergantung dari pada kiai tersebut. Artinya pendatang bisa merangkul masyarakat atau tidak”.<sup>33</sup>

Pertimbangan masyarakat untuk menjadikan kiai sebagai rujukan tidak serta merta dalam kapasiti mereka sebagai kiai. Masyarakat sangat memperhatikan aspek kemampuan atau kapabiliti, kredibiliti serta kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang ramai. Jika di Jawa soal *nasab* (keturunan) itu menjadi faktor yang sangat kuat, tidak demikian halnya di Lampung. Aspek itu dapat sahaja memiliki peran tapi sangat kecil untuk tidak dikatakan tidak ada sama sekali.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Temu bual KH. Muchtar Ghozali, 22 September 2013.

<sup>34</sup> Ibid.

Faktor pengasuhan atau patronase juga dapat menjadi alasan mengapa kiai di Lampung memiliki fungsi yang terhad dalam mempengaruhi orang ramai. Hampir kebanyakan kiai di Lampung berusaha untuk menyambungkan jalur intelektualnya kepada kiai di Jawa.<sup>35</sup> Hingga kurang lebih tahun 1999, kiai di Lampung kerap mengidentifikasi diri sebagai murid kiai Jawa. Dengan kata lain, (kiai) Lampung merupakan subordinat Jawa. Pola ini yang secara budaya membuat posisi tawar kiai di Lampung agak lemah, kerana dianggap bukan orang Lampung, melainkan Jawa. Wajar jika kemudian kiai hanya dapat mempengaruhi masyarakat pesantren yang mayoritasnya adalah Jawa. Bahkan untuk menjangkau kelompok Jawa yang non-pesantren peran kiai relatif agak terhad.

Menurut As'ad, di Lampung boleh dikatakan pesantren merupakan benteng budaya masyarakat Jawa.<sup>36</sup> Mereka yang belajar di pesantren, hampir semuanya adalah Jawa. Sedikit sekali orang Lampung yang belajar di pesantren. Masyarakat Jawa yang berada di Lampung, berusaha untuk membangun Jawa baru yang berusaha membezakan dirinya dengan Jawa yang ada di Pulau Jawa. Masyarakat Jawa di Lampung seperti memiliki beban psikologi ketika mereka balik ke Jawa. beban itu terwakili dalam dua kata; *kurang* dan *wirang*. “Kurang”, kerana dianggap miskin dan *wirang* kerana prestij yang tinggi. Harga diri masyarakat Lampung itu sangat tinggi sehingga tidak ingin begitu sahaja dipermalukan. Padahal, di Jawa masyarakat transmigran itu seperti orang terbuang dari kampung halamannya. Masyarakat baru ini hendak menjadikan Lampung sebagai *melting pot*.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Temu bual Mahrus As'ad, 21 September 2013.

<sup>37</sup> Ibid.



Posisi pesantren sendiri pada gilirannya tidak dapat dikatakan sebagai agen utama dalam melakukan transformasi sosial.<sup>38</sup> Masyarakat di Lampung relatif lebih cair. Ketaatan masyarakat lebih disandarkan pada orang tua atau orang yang lama tinggal di suatu tempat, bukan kiai. Kalaupun ada pesantren yang punya pengaruh, itu lebih kerana ketokohnya. Inilah yang kemudian membuat perbezaan mendasar dalam tradisi pesantren sendiri. Karakter pesantren di Lampung dan Jawa sangat berbeza. Di Jawa, kiai berhadapan dengan santri dan masyarakat yang homogen. Sementara di Lampung, kiai berhadapan dengan masyarakat yang cenderung heterogen. Tidak hanya orang Jawa sahaja, tetapi orang Lampung yang memiliki karakter budaya berbeza. Dalam tradisi mencium tangan misalnya. Masyarakat Lampung tidak mengenal budaya cium tangan selain orang tua dan kerabat yang tua. Sementara di Pesantren para santri mencium tangan ustaz dan kainya.<sup>39</sup>

Kiai Muchtar menuturkan bahawa apa yang menjadikan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus menerus merosot dari satu pilihan raya ke pilihan raya lainnya lebih kerana persoalan kepercayaan orang ramai yang menurun seiring dengan konflik yang berkepanjangan.<sup>40</sup> Jadi kepercayaan masyarakat yang turun kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak serta merta harus dimaknai pudarnya kepercayaan kepada kiai. Di Lampung sendiri, menurut Kiai Muchtar, PKB masih sangat mungkin untuk dikembangkan kerana eskalasi konfliknya tidak setajam di Jawa. Di Lampung, masih banyak jamaah yang mahu membesarkan parti tanpa ada pola transaksional. Tinggal bagaimana aktivis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melihat peluang tersebut sebagai kekuatan yang sepatutnya dapat dipertahankan.

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Temu bual KH. Muchtar Ghozali, 9 Mei 2013.

Dengan mencermati posisi pesantren di tengah masyarakat, maka peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Lampung mempertimbangkan dinamika tersebut. Hubungan pesantren dengan masyarakat adalah hubungan yang khas.<sup>41</sup> Kerana itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mesti berperan seperti halnya pesantren. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencermati masyarakat Lampung yang plural. Meski basis utama mereka adalah Jawa, tetapi Lampung tidak hanya Jawa sahaja.

Memadukan aspek tradisional dan modern dalam kerangka parti politik memang bukan perkara mudah. Tidak dapat dinafikan, bahawa basis massa ideologi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah masyarakat tradisional.<sup>42</sup> Tapi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sendiri adalah parti politik yang tentu sahaja mesti tunduk pada asas parti moden. Makanya kerap kali terjadi benturan antara bungkus dan isi. Disinilah kerap terjadi kompromi antara keperluan yang sangat pelbagai tersebut.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung Timur misalnya. KH. Sahlan sebagai Rois Syuriah (ketua dewan ulama) mengatur penentuan kader atau pelapis sebagai calon legislatif. Jika ada enam daerah pemilihan di wilayah tersebut, ia mengeluarkan kebijakan, 4 orang Jawa di nombor satu dan 2 orang Lampung di nombor satu.<sup>43</sup> Kompromi tersebut mesti dilakukan mengingat perlu adanya akomodasi terhadap basis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

---

<sup>41</sup> Temu bual Mahrus As'ad, 21 September 2013.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Temu bual KH. Sahlan, 11 Mei 2013.

Di tengah transformasi pemikiran dan aksi politik di Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi penerjemah idea demokrasi, inklusivitas dan meninggalkan kecenderungan sektarianistik.<sup>44</sup> Disini peran Gus Dur sangat terasa. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak ubahnya sebagai institusionalisasi idea Gus Dur dalam konteks politik.<sup>45</sup> Dalam melakukan upaya perubahan dalam masyarakat umum, mindset inilah yang digunakan sebagai piawian kerja Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

### **Strategi dan Sikap Politik PKB terhadap Pesantren**

Sebagai salah satu basis warga nahdliyyin, keterlibatan pesantren dalam dunia politik tentunya memiliki dampak secara langsung. Ada memori yang kembali muncul ketika pesantren berkecimpung di politik. Kenangan mengenai kejayaan Parti NU di era orde lama. Dampak secara langsung yang dirasakan oleh pesantren ialah, momentum ini membuka kesempatan bagi pelapis atau kader-kader terbaik di pesantren (keluarga atau alumnusnya) untuk terlibat langsung dalam proses-proses politik.<sup>46</sup> Bahagian ini akan penulis gambarkan di sub bab berikutnya.

Pesantren, dengan segala atribut yang disematkan kepadanya, jelas merupakan magnet bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pesantren begitu antusias melibatkan diri dalam aktiviti politik. Sedar bahawa NU membidani

---

<sup>44</sup> Effendy Choirie, *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB: Studi Komparasi dan Diplomasi*, Jakarta: Pensil-324, 2009, hlm. 139.

<sup>45</sup> Syaiful Mujani, *Kekalahan Partai Islam*, dalam H. Basyaib dan H. Abidin (eds.), *Mengapa Partai Islam Kalah?: Perjalanan Politik Islam dari Prapemilu 99 sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta: Alfabet, 1999, hlm. 195.

<sup>46</sup> Temu bual Syamsudin Thohir, 21 September 2013.

lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka kalangan pesantren di Lampung hampir semuanya berbondong-bondong membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dan disini memang harus diakui ada hubungan yang kuat antara, Pesantren, PKB dan Jawa. Thohir bercerita jika suatu ketika saudaranya dari Jawa datang ke Sumatera (Lampung, red) hanya untuk memastikan bahawa ia ikut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).<sup>47</sup>

Sebenarnya, posisi politik NU itu sudah lama menjadi magnet di Lampung, termasuk di era kepemimpinan Suharto. Setiap momen politik di peringkat tempatan, NU selalu dimintai pertimbangan sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengaruh luas. Thohir mengatakan;

“Namun NU di Lampung itu menjadi perhitungan. Dulu zamannya Pak Harto, orang Lampung itu jamaahnya kan NU. Sebelum *nyalon* bupati itu harus minta restu dari NU. Perhitungannya, agar Lampung tidak ada gejolak. Waktu reformasi hal itu masih kita rasakan”.<sup>48</sup>

Tingginya kesedaran politik warga pesantren di era-era awal (Pilihan raya 1999), menjadikan kerja-kerja konsolidatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih mudah. Langkah strategik yang dilakukan PKB lebih pada upaya penegasan tentang bagaimana cara berpolitik yang bersesuaian dengan nafas *Ahlussunnah wal Jama'ah*.<sup>49</sup>

KH. Khusnan Musthofa Ghufroon misalnya menjelaskan kepada jamaah di pesantren bahawa datang ke ketempat pembuangan undi atau tempat pemungutan

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ibid.

suara (TPS) itu wajib hukumnya untuk melestarikan kepemimpinan.<sup>50</sup> Tidak adanya pemimpin akan menyebabkan kekacauan di sebuah wilayah. Bahkan kampung sahaja mesti ada ketuanya. Kerana itu, pemilu (pilihan raya umum) merupakan bahagian dari kewajiban warga pesantren untuk memilih pimpinan.

Pemahaman terhadap pentingnya berpolitik dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah menjadi salah satu pemasaran atau marketing politik yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dan ideologi *ahlu sunnah wal jama'ah* pada parti politik itu adalah PKB.<sup>51</sup> Itu yang sering dicontohkan pada pelapis-pelapis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penekanan hal ini terus menerus dilakukan kerana faktanya pada pilihan raya umum 2004 dan ketika konflik mula menyelimuti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), *nahdliyyin* mula merasakan kejenuhan ketika berbicara tentang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tentu sahaja hal itu bukannya tanpa tantangan. Parti Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menggunakan dalil yang sama iaitu Ahlussunnah wal Jamaah serta beberapa diantaranya menjadikan pesantren sebagai landasannya atau jangkarnya. Untuk menanggapi hal ini, aktivis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kemudian mengambil sejarah sebagai rujukan untuk mengantisipasi derasnya sokongan kepada PPP. Menurut mereka, sejarah menunjukkan bahwa NU secara tegas menarik diri dari PPP. Dan NU kemudian membidani PKB pada 1998. Apalagi kenyataannya, di tubuh PPP (selepas reformasi) banyak berkembang aliran-aliran keras yang tidak sesuai dengan paham moderatnya NU.<sup>52</sup> Terlebih lagi banyaknya aktivis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berpindah ke parti lain,

---

<sup>50</sup> Seperti dituturkan oleh Syamsuddin Thohir.

<sup>51</sup> Temu bual Amin Thohari.

<sup>52</sup> Temu bual Amin Thohari, Musa Zainuddin, 20 September 2013.

semisal PPP, karena faktor peribadi. Berpindahnya KH. Daroini Ali<sup>53</sup> dari PKB ke PPP pada pilihan raya umum 2014 dilatari oleh kekecewaannya terhadap KH. Ngaliman Marzuki.<sup>54</sup>

KH. Muchtar Ghozali pimpinan pondok pesantren Baitul Mustaqim mengatakan tingkat pragmatisme yang masih rendah di kalangan pesantren di Lampung juga menjadi keuntungan tersendiri bahagi warga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Sebenarnya kalau di Lampung itu masyarakatnya *bloko suto* (apa adanya). Di Lampung menurut saya masih bisa dipoles. Kalau kita mau menggaet Kyai dengan jamaahnya itu bisa diperoleh oleh para politik. Coba di Jawa. Di Jawa kalau tidak ada uangnya *gak* bisa. Saya itu melihat sendiri bagaimana orang yang merintis agama disitu (baca: di Jawa) *nyalon* kebetulan dari PPP. Di tempat perjuangannya itu, sama sekali tidak ada yang mendukung. Alasannya kenapa karena tidak ada uang. Kalau di Lampung tidak muluk-muluk. Tinggal polesannya seperti apa. Yang jelas, kalau memang ada kader NU masuk ke politik PKB, itu karena ada hubungan emosional”.<sup>55</sup>

Persoalannya, lanjut Ghozali, politisi-politisi di Lampung termasuk di dalamnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)itu tidak dapat melihat peluang ini. Sehingga banyak yang apatis. Tak sedikit juga akhirnya Kiai yang sudah malas bicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski sebenarnya, para kiai itu masih sangat menyayangkan jika suatu ketika (PKB) benar-benar menjadi parti yang mandul dan tidak boleh menjadi saluran aspirasi warga Nahdliyyin. “*Tapi nek disawang, njengkel,*”<sup>56</sup> lanjut KH. Muchtar Ghozali. Meski begitu Muchtar Ghozali menambahkan sejelek-jeleknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tetap saja parti

---

<sup>53</sup> KH. Daroini Ali adalah anggota DPRD Provinsi Lampung tahun 2004-2009 dari PKB.

<sup>54</sup> Temu bual Amin Thohari.

<sup>55</sup> Temu bual KH. Muchtar Ghozali, 9 Mei 2013.

<sup>56</sup> Bahasa Jawa yang ertinya, Tapi kalau dilihat-lihat marah.

ini memiliki manfaat (bagi warga NU). Kelemahan warga pesantren dan kalangan NU pada akhirnya ketika akan berkecimpung di dunia politik ialah mereka memiliki moral tapi tidak punya modal.<sup>57</sup>

Kewujudan pesantren sebagai komunitas inti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menghantarkan 8 orang menduduki kerusi DPRD Provinsi Lampung pada tahun 1999 dan 6 orang di tahun 2004. Musa Zainuddin, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung (2006-sekarang) mengatakan bahawa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) konsisten dengan menjadikan nahdliyyin sebagai basis.<sup>58</sup> Sejak kepemimpinannya, ia terus mengawal dan mempertahankan kiai, kerana memang kiai mesti terus didekati. Meskipun pada kenyataannya ada juga kiai yang tidak mahu terjun langsung dalam politik. Kalau berbicara pondok pesantren, maka di situ ada sosok atau figur kiai. Disitulah simpul nahdliyyin berada. Atas dasar itu, maka pesantren tetap menjadi keutamaan PKB untuk memperoleh undi.

Meski kekuatan inti ada di pesantren, tetapi Musa tidak menafikan adanya perluasan jaringan untuk meraih undi.

“Misalnya saya pernah di senat mahasiswa, kemudian di PMII, kan itu jaringan, sekolah saya mulai SMP sampai sekarang sekolahnya di Lampung, ada teman SMP yang bukan NU ada yang jadi lurah, ada yang camat, kan ini secara diam-diam (bisa diajak bergabung)”.<sup>59</sup>

Realiti pesantren juga mesti dilihat dari sisi lain. Meski ia memiliki loyaliti, tetapi ada fakta menyatakan bahawa mereka berhadapan dengan keperluan-keperluan yang bersifat praktis. Musa menuturkan, ada keperluan yang mesti dipenuhi

---

<sup>57</sup> Temu bual KH. Muchtar Ghazali.

<sup>58</sup> Temu bual Musa Zainuddin, 20 September 2013.

<sup>59</sup> Temu bual Musa Zainuddin.

pesantren untuk banyak hal seperti pembangunan, pelaksanaan kegiatan berukuran atau skala besar (pengajian) serta keperluan lainnya. Sementara sumber-sumber itu sangat terhad. Intervensi kerajaan terhadap pesantren juga sangat terhad jumlahnya. Peruntukan belanjawan ke pesantren sangat minim.<sup>60</sup>

Menghadapi keadaan ini, maka yang dapat dilakukan oleh PKB adalah mengawal anggaran yang pro (berpihak) pesantren.<sup>61</sup> Fraksi PKB yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Parlimen/DPRD) Provinsi dan Kabupaten mesti cerdas melihat keadaan pemilihnya atau konstituennya, iaitu pesantren. Bagaimana misalnya memperjuangkan anggaran untuk pembenahan fizikal pesantren, menambah ruang belajar, bangunan, pengadaan perigi gerudi (bor) dan lainnya.

Komitmen PKB terhadap NU ditunjukkan misalnya di wilayah Lampung Timur. KH. Sahlan, Ketua Dewan Syuro PKB Lampung Timur tahun 1999 mengatakan sumbangani PKB terhadap NU itu sangat besar, terutama dalam bentuk materi.<sup>62</sup> PKB ketika itu misalnya mendanai semua keperluan ketika Gerakan Pemuda (GP) Anshor melaksanakan halaqoh se-Sumatera. Bangunan Pengurus Cabang NU Lampung Timur juga hasil dari pada perjuangan dari PKB setempat.

Dalam dekad waktu tahun 1999-2009 hubungan PKB dengan pesantren sangat erat, seperti keluarga. Jemputan hanya dikirim melalui *short message service* (SMS) dan semuanya hadir. Meski tidak menjadi anggota DPRD, pimpinan PKB baik Syuriah mahupun Tanfidznya sangat disegani, terutama oleh pelapis atau kader PKB yang duduk di DPRD.

---

<sup>60</sup> Temu bual Musa Zainuddin.

<sup>61</sup> Temu bual Okta Rijaya, 23 Maret 2013.

<sup>62</sup> Temu bual KH. Sahlan, 11 Mei 2013.



“Saya sering perintahkan teman-teman di DPRD. Tolong potong gaji buat pondok-pondok yang ulang tahun. Dan benar, gaji mereka dipotong untuk biaya-biaya acara. Paling satu juta cukuplah. Pernah juga satu waktu anggota DPRD sama sekali tidak menerima gaji, saat kita mendatangi KH. Hasyim Muzadi”.<sup>63</sup>

Untuk memperkuat proses pendidikan terhadap pesantren, aktivis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kerap menyisipkan pesan-pesan itu dalam aktivitas yang diadakan oleh kalangan pesantren. Musa misalnya mencontohkan, dalam kegiatan yang dibuat oleh NU sama ada dalam bentuk pengajian, halaqah dan sebagainya ia kerap mengoptimalkan kegiatan-kegiatan tersebut.<sup>64</sup> ketika ada pesantren yang mengadakan haul dan menjemput mereka, biasanya dirinya diminta untuk memberi pidato atau sambutan. Disinilah ia punya peluang untuk memberikan pendidikan politik. Momen tersebut sebenarnya tak hanya dimanfaatkan oleh para politisi, tetapi juga pemerintah. Pemerintah yang cerdas juga sering menumpang untuk mensosialisasikan program mereka.

Musa memahami bahawa kegiatan keagamaan di kalangan NU sangatlah beragam. Ada banyak acara keagamaan yang kerap mendatangkan banyak orang ramai. Disitulah ia sering memberi sambutan atau semacam *taushiyah* politik. Dengan panjang lebar Musa mencontohkan salah satu esensi taushiyah politik yang disampaikannya pada tahun 2013.

“Sering saya mulai begini. “Pemilu itu pesta demokrasi, nanti tanggal 9 April 2014 seluruh warga Indonesia akan menarik mandatnya. Tinggi mana daulat rakyat sama pejabat? Ya tinggi rakyat. Ya memang begitu karena kedaulatan untuk rakyat. Nanti 9 April itu akan menarik mandat 2009, dan menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Contoh Gus Dur membuat reformasi. Namanya pemerintah kan juga misi dan sasaran. Salah satu komitmen reformasi adalah Indonesia terbebas dari korupsi, pertanyaannya saya, sekarang korupsi sudah hilang belum?”

---

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Temu bual Musa Zainuddin.

Belum semua bahkan semakin parah. Dulu ibu-ibu waktu memberikan mandat nyesel tidak. Nah 2014 ini jangan sampai menyesal, sehingga ibu-ibu jangan sampai salah pilih.” Dari sini baru masuk PKB. Ini termasuk pendidikan politik sekaligus mengajak masyarakat untuk cerdas”.<sup>65</sup>

Musa menambahkan bahawa meski lahir dari kalangan tradisional, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus menjadi parti moden. *Pertama*, pengambilan keputusan di parti tidak boleh bersandar pada individu. *Kedua* pengurusan parti yang merupakan bahagian dari pemeraksanaan. Parti ini bekerja sebagai penyalur aspirasi, sehingga banyak tugasnya. Tentu sangat menyusahkan jika pengurusannya tidak berjalan. *Ketiga* kepemimpinan. Pemimpin yang baik ialah yang memiliki integriti dan visi yang jelas. Visi ke-NU-an dan kebangsaan mesti lengkap. Dari tiga perkara inilah parti dibangun untuk menjadi parti yang kuat.<sup>66</sup>

Soal sosok atau figur kiai, Musa mengatakan bahawa kiai itu mesti ditempatkan pada had yang memang ia mampu. Untuk mengatur komuniti parti yang latar belakangnya beragam, maka perlu pembahagian peran. Kalau perannya disamaratakan maka bukan tidak mungkin mesin parti tidak akan berjalan. Pelaksanaan mesyuarat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelum ia memimpin, cukup dilaksanakan dirumah kiai sahaja. Hal tersebut mula ia transformasikan dengan membuat pejabat untuk urus setia. Kepentingan yang ditampung juga tidak hanya dari pada mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sahaja, akan tetapi juga dari kampus lainnya.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid.

Bagi Musa, ini adalah bahagian dari pendidikan politik. Menurutnya, pendidikan politik itu adalah bagaimana menerangkan soal pembahagian peran, pengurusan parti dan visi dengan cerdas. Sasarannya ialah memahamkan kalangan pesantren bahawa undi mereka sangat menentukan pemimpin di masa hadapan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kemudian melakukan pengawalan terhadap undi pesantren ini dengan mendatanya.<sup>68</sup>

Tidak dapat dinafikan, bahawa ada penurunan dalam aktiviti politik dari semua elemen yang ada di pesantren. Salah satu alasannya, kata Musa ialah kerana para politisi tidak tuntas dalam memberikan pendidikan politik yang baik. Mereka kurang tepat dalam memberikan pendidikan politik sehingga menimbulkan kejenuhan. Dan tidak hanya pondok pesantren sahaja yang merasa jenuh tetapi juga masyarakat secara luas. Ketika para calon anggota legislatif itu melakukan kempen, mereka tidak berusaha untuk realistik sehingga tidak memberikan pendidikan politik yang baik.<sup>69</sup>

Yang terjadi kemudian anggota legislatif kerap menarik masyarakat ke dalam pragmatisme politik. Misalnya dengan membahagikan makanan asas dan wang. Inilah yang menunjukkan betapa politisi itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik. Walaupun dilanda konflik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Lampung tetap dapat cukup eksis meski perolehan undi untuk DPRD Provinsi berkurang dua kerusi. Tentang hal ini, Musa mengatakan bahawa ada dua alasan mengapa hal itu terjadi. Disamping masih menjalarnya euforia reformasi, suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masih besar juga didasarkan atas kuatnya keinginan ulama NU yang ingin terjun ke politik praktis. Pada tahun 1999 hal

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid.

tersebut menjadi kekuatan yang utuh. Setelah berkonflik, banyak yang kemudian berpindah dan yang berpindah parti ini punya potensi untuk mengancam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Maka konflik mesti sedapat mungkin dikurangkan. Maka, ketika ia memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung, pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menggunakan sistem aklamasi.<sup>70</sup>

Strategi yang digunakan oleh NU ketika berhadapan dengan orde baru adalah dengan mengatakan bahawa “NU itu neutral, ada di mana-mana dan tidak ada di mana-mana”. Dalam situasi organisasi yang belum mapan, maka model aklamasi inilah terapinya. Demokrasi di Amerika Serikat itu tidak menimbulkan konflik karena prosesnya sudah sihat. Syarat sihat itu berat kerana ini bersinggungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Demokrasi akan baik kalau keperluan mendasar masyarakatnya sudah terpenuhi, perut kenyang. Ukuran demokrasi itu jelas akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan.<sup>71</sup>

Musa menambahkan bahawa konflik kerap kali menimbulkan perpecahan di tubuh PKB. Kerana itu banyak kiai yang kemudian membenci Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kerana dianggap tidak sesuai dengan garis perjuangan NU. Terhadap hal tersebut Musa memiliki strategi dengan mengajak berbincang kiai-kiai tersebut.

" Saya sebenarnya punya terapi yang mujarab hasil dialog saya dengan para kyai. Ada kyai sepuh di lampung barat yang tadinya benci banget sama PKB sampai-sampai *ngapain* kamu bawa-bawa PKB. PKB mau dibubarin. Saya kemudian menemui kyai tersebut. Pak kyai, kalau soal agama saya ta'dzim tapi soal politik pak kyai harus ingat saya. Saya bilang Pak kyai kan cinta Gus Dur, saya juga. Sama. Tapi menurut saya,

---

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Ibid.

cara pak kyai mencintai gus dur keliru. Kalau saya sudah benar. Kalau saya cinta Gus Dur, saya ingin melanjutkan perjuangan Gus Dur. Tapi kyai cinta Gus Dur tapi tidak mau melanjutkan perjuangannya. Menurut saya PKB ini salah satu buah perjuangan Gus Dur. Sekarang tunjukkan ke saya bukti-bukti kalau Gus Dur membenci PKB. Atau bahkan Gus Dur pernah membubarkan PKB. Kalau kyai bisa membuktikan kepada saya, besok saya akan mengundang wartawan, saya akan mengumumkan PKB Lampung ini bubar. Gimana pak kiai. Setelah pulang saya diundang lagi, sekarang dia juga ikut kampanye. Ini namanya kreasi.<sup>72</sup>

Jika model kempen ini dilakukan kepada banyak kiai di Lampung, maka menurut Musa, hal ini akan sangat membantu perjuangan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Disitulah dia menekankan kepada jawatan kuasa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahawa perbincangan dengan kiai, tidak hanya melibatkan logika, tetapi juga hati. Kerana bagaimanapun juga kiai adalah simpul, maka simpul ini mesti diamankan.<sup>73</sup>

Meskipun begitu, tidak semua yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan para politisi pada amnya dapat diterima oleh pesantren. Syaikhu Ulum, pengasuh Pesantren Walisongo mengatakan bahawa harapan pesantren terhadap parti itu adalah dengan melakukan pendekatan yang betul-betul persuasif.<sup>74</sup> Ertinya, pendekatan peribadi dengan parti pesantren dan itu tidak hanya dilakukan ketika masa-masa tertentu sahaja. Ketika hal seperti itu terjadi maka warga pesantren akan merasa jenuh, kerana kehadiran parti hanya pada ketika momen politik sahaja namun setelah itu ditinggal. Setidaknya, pesantren dapat mengenal pengurus parti. Kerana banyak sekali santri-santri yang tidak mengenal pesantren yang selama ini dekat dengan mereka seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau PPP. Malah,

---

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Ibid

<sup>74</sup> Temu bual Syaikhu Ulum, 9 Mei 2013.

lanjut Ulum ada pengurus cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih banyak melakukan pendekatan juga Partai Golongan Karya (Golkar). Oleh dua parti tersebut, kalangan pesantren merasa diperhatikan.<sup>75</sup>

Hal yang sama dirasakan oleh Gus Rony, pengasuh Pesantren Baitul Mustaqim, Lampung Tengah.<sup>76</sup> Kiai-kiai merasa banyak yang ditinggal oleh ahi jawatan kuasa atau fungsionaris PKB. Padahal mereka sebenarnya memiliki kebanggaan kerana memiliki wakil di DPRD. Kerana itu silaturahmi ke kiai-kiai menjadi penting. Dalam hubungannya dengan politik, kata Rony ada tiga model kiai. Yang pertama ada kiai ojeg. Ojeg itu pengangkutan awam menggunakan motor. Ia melayani semua penumpang. Kiai ojeg adalah analogi untuk menggambarkan model kiai yang menerima dan mengamini semua parti politik yang ada padanya.<sup>77</sup>

Lalu model kedua adalah kiai *ujug-ujug* (tiba-tiba). Dalam momen-momen politik ada orang yang tiba-tiba menjadi kiai. Padahal dalam kehidupan keseharian sebelumnya, ia tidak terdengar memiliki riwayat kekhiaian atau melakukan kerja-kerja seperti halnya yang dilakukan oleh seorang kiai pada amnya. “Kiai” ini memanfaatkan momentum dengan tiba-tiba menjadi “kiai”.<sup>78</sup> Tipologi yang terakhir adalah kyai *ajeg* (tetap). Kiai ini mungkin model ideal, kiai yang istiqomah atau konsisten. Dalam percaturan politik, ia berusaha untuk konsisten. Tidak terjebak

---

<sup>75</sup> Temu bual Syaikhu Ulum.

<sup>76</sup> Temu bual Gus Rony, 9 Mei 2013.

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Ibid.

dalam pragmatisme politik, tetapi juga tidak apolitis. Pertimbangan kemaslahatan ialah yang utama bagi kiai model tersebut.<sup>79</sup>

Pada pilihan raya umum 2014, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hasil dari perbincangan dengan beberapa Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Lampung menunjukkan beberapa alasan mengapa undi parti ini mengalami kenaikan.<sup>80</sup> Salah satunya ialah peningkatan hubungan antara parti dengan NU. Di wilayah-wilayah dimana hubungan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NU tidak terlalu harmoni, undi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak terlalu berkembang atau cenderung tetap.

Meskipun demikian, secara am, pembangunan hubungan majoriti bersifat budaya (belum idiologi). Misalnya dengan dengan menyokong kegiatan-kegiatan warga NU, pondok pesantren dan lainnya. Fungsi parti sebagai wadah agregasi dan artikulasi kepentingan telah mula dijalankan dalam bentuk advokasi anggaran, program yang menyentuh masyarakat khususnya warga NU. Selain itu, upaya untuk membantu program-program pesantren, meneruskan program usulan anggaran ke provinsi mahupun pusat yang dibantu parti juga terus dilakukan. Hemat penulis,

---

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Temu bual dengan Taufik Rahman, Ketua PKB Bandar Lampung, Ubaidillah Ketua DPC Pesawaran, Maulana M Lahudin Ketua DPC Pringsewu, Ali Yudiem, S.H. , Ketua DPC Pesisir Barat, Tabrani Rajab Ketua DPC Lampung Utara, Seh Ajeman Ketua DPC Way Kanan, Ky. Jupri, S.Pd Ketua DPC Mesuji, Kodratulloh Sidiq, S.H Ketua DPC Metro, Azwansyah Sekretaris DPC Tanggamus, Sholih Taufik, S.Pd.I Ketua DPC Tulang Bawang Barat, Yohansyah Akmal Ketua DPC PKB Lampung Barat, Khaidir Bujung Ketua DPC Tulang Bawang, pada tanggal 22 Desember 2015.

inilah salah satu kunci yang berjaya menaikkan perolehan undi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada pilihan raya umum 2014.<sup>81</sup>

### **Fungsi Pendidikan: Pesantren sebagai Institusi Pendidikan dan Basis Politik**

Pesantren merupakan rumah santri dimana para santri (orang yang belajar di pesantren) berkumpul untuk menuntut ilmu. Pesantren merupakan institusi pendidikan islam tradisional yang umurnya hampir sama dengan kehadiran datangnya Islam ke Indonesia. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyebut pesantren sebagai sebuah kehidupan yang unik. Pesantren merupakan kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan di sekitarnya.<sup>82</sup> Ini menunjukkan makna pentingnya ciri-ciri pondok pesantren sebagai sebuah lingkungan pendidikan yang integral. Pondok pesantren mempunyai budaya yang unik. Karena keunikannya, pondok pesantren digolongkan ke dalam bahagian budaya tersendiri dalam masyarakat Indonesia.<sup>83</sup>

Pondok pesantren merupakan jenis pendidikan Islam yang didirikan dan diselenggarakan atas dasar hasrat, motivasi, niat dan semangat untuk mewujudkan nilai-nilai Islam yang diwujudkan dalam visi misi, tujuan maupun program pendidikan.<sup>84</sup> Sebagaimana yang diketahui bahawa pondok pesantren ialah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah menunjukkan kemampuan dalam mencetak pelapis-pelapis ulama. Dengan adanya tujuan daripada pondok pesantren

---

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*, Jogjakarta: LKiS, 2007, hlm 3.

<sup>83</sup> Abdurrahman Wahid, *Pondok Pesantren Masa Depan*, dalam Marzuki Wahid, et.al (eds.), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1999, hlm. 13.

<sup>84</sup> Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, Bandung: Nuansa, 2003, hlm. 14.



ini, maka hal tersebut semakin memperkuat kewujudannya.<sup>85</sup> Zamakhsyari Dhofier menjelaskan lima unsur yang ada dalam setiap pondok pesantren. Kelima unsur tersebut adalah pondok, mesjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri dan kiai. Kiai sebagai pimpinan pondok pesantren. Para santri yang bermukim di pondok dan belajar kepada kiai serta asrama (pondok) sebagai tempat tinggal para santri. Pengajian sebagai bentuk pengajaran kiai terhadap santri dan mesjid sebagai pusat pendidikan dan pusat kegiatan pondok pesantren.<sup>86</sup>

Secara umum pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga dakwah, sebagai lembaga sosial.<sup>87</sup> Meskipun fungsi utamanya dalam bidang pendidikan, tetapi pesantren juga tetap memiliki fungsi-fungsi sebagai (i) lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama (*tafaquh fi al dien*), dan nilai-nilai Islam (*Islamic values*) (ii) lembaga keagamaan yang melakukan kawalan atau kontrol sosial (*social control*) dan lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (*social engineering*).<sup>88</sup>

Sejarah mengenai berdirinya pesantren di Indonesia kerap disandarkan pada dua versi yang berbeza.<sup>89</sup> *Pertama*, pondok pesantren berakar pada tradisi Islam itu sendiri, iaitu tradisi tarekat. Pondok pesantren mempunyai kaitan yang erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini berdasarkan fakta bahawa penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih banyak dikenal dalam bentuk

---

<sup>85</sup> Tim Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, Jakarta: Ditjen Kelambagaan Agama Islam dan Pondok Pesantren, 2003, hlm. 3-5.

<sup>86</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982, hlm. 44-60.

<sup>87</sup> M. Bahri Ghazali, *Pesantren berwawasan*, hlm. 36-39. lihat juga Tim Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pondok Pesantren*, Jakarta: Ditpeka Pontren Ditjen Kelembagaan Agama Depag RI, 2003, cet. 3, hlm. 20-22.

<sup>88</sup> M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnur Dilo, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2003, hlm. 6.

<sup>89</sup> *Ibid.*

kegiatan tarekat. Hal ini ditandai dengan terbentuknya kelompok organisasi tarekat yang melaksanakan amalan-amalan zikir dan wirid tertentu. Dan pemimpin tarekat itu dikenal sebagai kiai. Di samping mengajarkan amalan tarekat para pengikut itu juga diajarkan kitab agama. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pengajian ini tumbuh dan berkembang menjadi pondok pesantren.<sup>90</sup>

*Kedua*, pendapat yang mengatakan bahawa pondok pesantren yang kita kenal sekarang ini pada mulanya adalah pengambilalihan dari sistem pondok pesantren yang diadakan orang-orang Hindu di Nusantara. Hal ini didasarkan pada fakta bahawa pada masa sebelum datangnya Islam ke Indonesia, pondok pesantren sudah ada di negeri ini. Pendirian pondok pesantren pada masa itu sebagai tempat mengajarkan ajaran-ajaran agama Hindu. Fakta lain bahawa pondok pesantren bukan berasal dari tradisi Islam ialah kerana tidak ditemukannya lembaga pondok pesantren di negara-negara Islam lainnya.<sup>91</sup>

Salah satu yang menyokong pendapat kedua ialah sejarawan Agus Sanyoto. Dalam karyanya “Wali Songo: Rekonstruksi Sejarah Yang Disingkirkan,” Sanyoto mengatakan bahawa salah satu proses Islamisasi yang dilakukan oleh Walisongo melalui pendidikan adalah mengambil-alih lembaga pendidikan Syiwa-Buddha yang disebut asrama atau dukuh yang diformat sesuai ajaran Islam menjadi lembaga pendidikan pondok pesantren.<sup>92</sup> Sebelum tahun 1960-an, pusat pendidikan pesantren di Jawa dan Madura lebih dikenal dengan nama pondok.<sup>93</sup> Punduk berasal dari kata

---

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Agus Sanyoto, *Wali Songo: Rekonstruksi Sejarah Yang Disingkirkan*, Jakarta: Traspustaka, 2011, hlm. 94-97.

<sup>93</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982, hlm. 18.

*funduq* (bahasa Arab) yang artinya asrama atau hotel (baca: tempat menginap). Sementara pesantren berasal dari kata santri dengan awalan *pe* dan akhiran *an* yang berarti tempat tinggal para santri.<sup>94</sup> CC. Berg, sebagaimana dikutip Dhofier mengatakan santri berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang ahli kitab suci Agama Hindu (*Shastra*: buku-buku suci).<sup>95</sup>

Secara historis, bila kali pertama kewujudan pondok pesantren di Indonesia diketahui, susah sekali diperoleh keterangan pasti. Tahun 1984-1985 Departemen Agama mendata dan memperoleh keterangan bahawa pesantren tertua lahir pada tahun 1062 atas nama Pesantren Jan Tampes II di Madura. Namun, jika ada Jan Tampes II mestinya ada Jan Tampes I yang usianya tentu lebih tua dari itu.<sup>96</sup>

Kehadiran Islam di Indonesia dapat diidentifikasi sejak abad ke-7 M yang dikenalkan oleh musafir dan pedagang muslim, melalui jalur perdagangan dari teluk Parsi dan Cina yang telah bermula sejak abad ke-5 M. Sejak abad 11 M dapat dipastikan Islam masuk ke Kepulauan Nusantara melalui kota-kota pantai.<sup>97</sup> Ini bisa dibuktikan misalnya dengan ditemukannya batu nisan atas nama Fatima binti Maimun yang wafat pada tahun 1082 di Leran, Gresik, makam Malikus Salih di Sumatra (abad 13 M) dan makam wanita muslim bernama Tuhar Amisuri di Barus Pantai Sumatera (602 H).<sup>98</sup>

---

<sup>94</sup> M. Bahri Ghazali, *Pesantren Berwawasan*, hlm. 20.

<sup>95</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 18.

<sup>96</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994, hlm. 19.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>98</sup> Tentang inskripsi Islam di Indonesia bisa dibaca dalam Claude Guillot dan Ludvik Kalus, *Inskripsi Islam tertua di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.

Setelah itu kemudian Islam menyebar secara intensif ke seluruh nusantara pada abad 13 sampai 17 M. Berdiri pula pusat kerajaan di Aceh, Demak, Giri, Ternate/Tidore, dan Gowa Tallo di Makasar. Dari sentrum kekuasaan inilah Islam disebarkan oleh para peniaga, wali, ulama, mubalig dan lainnya. Mereka mendirikan pesantren, dayah dan surau.<sup>99</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahawa pesantren telah mula dikenal di bumi Nusantara ini pada masa abad 13-17 M dan di Jawa terjadi dalam abad ke 15-16. Dalam karya Jawa klasik semisal Serat Cabolek dan Serat Centini dituturkan bahawa sejak awal abad ke 16, di Indonesia banyak dijumpai lembaga-lembaga yang mengajarkan pelbagai kitab Islam klasik dalam bidang fikah, akidah, tasawwuf dan menjadi pusat penyiaran Islam iaitu pondok pesantren.<sup>100</sup>

Pada sekitar abad 18, kehadiran pesantren sebagai lembaga pendidikan semakin terasa terutama dalam konteks penyiaran agama. Kelahiran pesantren, menurut Mastuhu, selalu diawali dengan cerita “perang nilai” antara pesantren dan masyarakat sekitar dan diakhiri dengan kemenangan pesantren. Kemudian, pesantren diterima sebagai bahagian dari masyarakat dan menjadi panutan dalam menegaskan nilai-nilai moral. Hadirnya pesantren dengan jumlah santri yang besar memungkinkan terjadi kontak budaya antara masyarakat dari pelbagai latar belakang suku dengan masyarakat sekitar. Denyut perekonomian menjadi kuat terasa akibat hadirnya pesantren tersebut.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem*, hlm. 20.

<sup>100</sup> Tim Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Pola Pengembangan*, hlm. 10-11.

<sup>101</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem*, hlm. 20.

Pesantren menjadi lembaga yang cukup berperan menentukan watak keberislaman di nusantara. Dengan begitu pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan tetapi juga lembaga penyiaran agama, dan sosial keagamaan. Sebagaimana dikutip Dhofier, Sobardi dan Johns mengatakan:

“Lembaga-lembaga pesantren itulah yang paling menentukan watak ke-Islam-an dari kerajaan-kerajaan Islam, dan yang memegang peranan paling penting bagi penyebaran Islam sampai ke pelosok-pelosok. Dari lembaga-lembaga pesantren itulah asal-usul sejumlah manuskrip tentang pengajaran Islam di Asia Tenggara, yang tersedia secara terbatas, yang dikumpulkan oleh pengembara-pengembara pertama dari perusahaan-perusahaan dagang Belanda dan Inggris sejak akhir abad ke-16. Untuk dapat betul-betul memahami sejarah Islamisasi di wilayah ini, kita harus mulai mempelajari lembaga-lembaga pesantren tersebut, karena lembaga-lembaga inilah yang menjadi anak panah penyebaran Islam di wilayah ini”<sup>102</sup>

Pada masa kolonial, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dekat dengan rakyat. Selama masa itulah, lembaga ini lepas dari rencana pendidikan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah menilai sistem pendidikan Islam itu sangat jelek, baik dari tujuan, metode mahupun bahasa (Arab) yang dijadikan sebagai pengantar. Selain itu, pemerintah Belanda juga mula khawatir dengan perkembangan umat Islam.<sup>103</sup>

Pesantren mengambil jarak dengan pemerintah. Keadaan itu membuat mereka terus menerus mengembangkan dirinya, menjadi tonggak bagi perkembangan dakwah Islam. Kekhawatiran pemerintah kolonial semakin bertambah kerana pesantren juga mengajarkan tentang cinta tanah air, serta menumbuhkan sikap

---

<sup>102</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 17-18.

<sup>103</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem*, hlm. 21-22.

patriotik. Selain sebagai tempat menuntut ilmu keagamaan, pesantren juga menjadi ruang konsolidasi politik. Tempat menyusun strategi perang melawan kolonial.<sup>104</sup>

Situasi itu jelas terlihat misalnya ketika Indonesia memasuki zaman revolusi fisik. Santri banyak yang membentuk barisan tentara. Salah satunya ialah Hizbullah yang kemudian menjadi embrio Tentara Nasional Indonesia.<sup>105</sup> Ini artinya bahwa dalam tentara Indonesia ada elemen santri. Boland menggambarkan perbezaan karakteristik antara tentara angkatan darat yang berbeza dengan angkatan laut dan udara. Menurut Boland:

*“This characteristic of the army might be a difference from the navy and air force, of which both officers and men generally came from a more “secular” background (for example, education at a state secondary school supplemented by a special training in the USA). It could well be that this difference in atmosphere even continued to make itself felt up to the events of September 30th, 1965 and their aftermath”.*<sup>106</sup>

Lapisan baru muncul dikalangan pesantren. Mereka tidak lagi menjadi tempat bagi generasi muslim terkebelakang, tetapi pesantren mulai bergeser statusnya. Pesantren mula mendapatkan tempat di masyarakat sebagai institusi yang yang berprestij dan menjadi idola bahagi generasi muslim yang hidup pada era kemerdekaan. Gambaran ini dapat disimak dalam memoar Syaefuddin Zuhri;

“Mendekat (pesantren) Tebu Ireng khayalanku memenuhi kepala. Tergambar angan-anganku tentang sebuah pesantren besar dengan para pengasuhnya yang bercita-cita besar di bawah pimpinan seorang ulama besar. Aku merasa bersyukur bahwa dalam hidupku kuperoleh kesempatan untuk mengunjungi Pesantren Tebu Ireng yang termasyhur. Walaupun tidak lama, tetapi waktu

---

<sup>104</sup> Ini misalnya didasarkan pada pepatah, “hubbul wathan minal iman” yang artinya cinta tanah air sebagian dari iman.

<sup>105</sup> B. J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1971, hlm. 13.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm, 13.

dan kesempatan yang terbatas itu akan kumanfaatkan untuk belajar dari Tebu Ireng sekalipun hanya dalam sehari dua”<sup>107</sup>

Peran politik kalangan pesantren terbukti sangat penting dalam era kemerdekaan itu. Ketika Belanda dikalahkan Jepun, kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama (NU) terus menerus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh NU, termasuk KH. Hasyim Asy’ari ditahan. Saat Jepun ditaklukan sekutu, keadaan bangsa Indonesia tidak juga stabil. Akhirnya, pada 22 hari bulan Oktober 1945 para ulama dipimpin KH. Hasyim Asy’ari mengeluarkan seruan jihad melawan sekutu.<sup>108</sup>

Jaringan pondok pesantren terbangun dan semakin mantap ketika NU ditubuhkan pada 1926. Jaringan diantara para ulama Hindia Belanda semakin kuat. Ulama menjadi golongan sosial yang distinktif. NU menjadi wadah moden bagi kelompok muslim tradisional. NU memfasilitasi ulama untuk membicarakan kembali tentang Islam tradisional dan menciptakan otoriti keagamaan di dalam komuniti muslim. Pengetahuan masyarakat muslim yang berbasis di pesantren tidak lagi hanya diperbincangkan secara terhad di kalangan mereka sahaja. Intelektual pesantren sekarang tampil ke panggung sosial dan politik.<sup>109</sup>

Hal tersebut bermula ketika Jepun merubah kebijakan dengan memberikan posisi kepada kelompok Islam. Selain dengan membentuk Hizbullah, pemerintah Jepun juga membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tahun

---

<sup>107</sup> Syaefuddin Zuhri, *Guruku orang-orang dari Pesantren*, Bandung: Al-Ma’arif, 1977, hlm. 92.

<sup>108</sup> Dikenal dengan Resolusi Jihad. Resolusi ini dikeluarkan dua kali masing-masing pada 22 Oktober 1945 dan 29 Maret 1946.

<sup>109</sup> Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Bandung: Mizan, 2012, hlm. 372.

1941. Masyumi menjadi semacam federasi umat Islam Indonesia. Lembaga ini menggantikan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Di organ inilah para Kiai mendapatkan tempat. KH. Hasyim Asy'ari menjadi pemimpin, dibantu Mas Mansoer dari Muhammadiyah, Wahid Hasyim, Zainal Arifin (keduanya dari NU) serta Anwar Tjokroaminoto dari Partai Sarikat Islam Indonesia.<sup>110</sup>

Selain Masyumi, Jepang juga mengangkat KH. Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Shumubu atau Kantor Urusan Agama menggantikan Hoesein Djajadiningrat. Terlepas dari kenyataan bahwa institusi-institusi tersebut didirikan untuk kepentingan pemerintah Jepang, terutama dalam meraih sokongan politik dari kelompok Muslim, tetapi jelas bahwa situasi itu menjadikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam lanskap politik bagi kalangan pesantren menjadi terbuka lebar. Fakta itu semakin nyata terlihat ketika NU secara langsung ikut berpartisipasi dalam wilayah politik yang bermula dengan Pilihan Raya Umum pada tahun 1955. Dengan jelas, bab ini menunjukkan bahwa pesantren sejak awal tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan sahaja, akan tetapi juga memainkan peran-peran politik didalamnya.<sup>111</sup>

Perkembangan pesantren di Jawa juga meluas ke wilayah-wilayah lain di nusantara. Salah satunya Provinsi Lampung yang secara geografi berada di ujung Pulau Sumatera. Islam masuk ke Lampung pada abad 15 melalui tiga kutub, dari barat (Minangkabau) melalui Belalau (Lampung Barat), utara (Palembang) melalui Komering pada masa Adipati Arya Damar (1443), dan dari arah selatan (Banten) melalui Sunan Gunung Jati, melalui Labuhanmaringgai di Keratuan Pugung (1525).

---

<sup>110</sup> Harry J. Benda, *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation*, The Hague: W. Van Hoeve, 1958, hlm. 151-168.

<sup>111</sup> Jajat Burhanudin, *Ulama Dan*, hlm. 373.



Kekuatan Banten semakin kokoh di Lampung karena Sunan Gunung Jati kemudian menikah dengan Putri Sinar Alam anak dari Ratu Pugung. Dari pernikahan ini, lahirlah Minak Kejala Ratu yang menjadi embrio Keratuan Darah Putih yang kemudian melahirkan Raden Intan.<sup>112</sup>

Kekuatan Banten sangat signifikan di Lampung. Ketika Sultan Iskandar Muda menduduki singgasana Kerajaan Aceh pada 1607-1636, hampir semua pelabuhan di Sumatera ia kuasai termasuk Pahang, Johor, Nias dan Bintan. Tapi Iskandar Muda tidak pernah berjaya menguasai Lampung, daerah penghasil lada yang ada bawah kendali Banten.<sup>113</sup> Pertentangan kerap kali terjadi antara kekuatan-kekuatan besar Kerajaan Islam untuk memperebutkan kekayaan alam yang ada di Lampung. Misalnya yang terjadi ketika penemuan emas pada tahun 1730. Penguasa Palembang dan Banten bersaing memperebutkan kekayaan itu yang kemudian mengundang orang Bugis, Minangkabau, dan kaum petualang lain untuk membuat kekacauan di ujung Pulau Sumatera itu.<sup>114</sup> Dengan begitu, hubungan sejarah antara Banten dengan Lampung tidak lagi dapat dinafikan.

Tapi memasuki era kolonial, tepatnya ketika Belanda menduduki Indonesia muncul kebijakan baru yaitu emigrasi yang dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia dengan nama transmigrasi.<sup>115</sup> Kebijakan itu dilatari oleh pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di Jawa. Tahun 1900, penduduk asli Jawa dan Madura sekitar 28,4

---

<sup>112</sup> Tentang sejarah masuknya Islam di Lampung bisa dibaca di Husein Sayuti, *Hubungan Lampung dengan Kesultanan Banten dalam Perspektif Sejarah 1500-1900*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985. Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978, Nanik Junaidah, *Islam di Lampung 1552-1570*, Skripsi Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2008.

<sup>113</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi, 2008, hlm. 85.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 326.

juta orang dan menjadi 34,4 juta orang pada tahun 1920, serta membengkak pada tahun 1930 menjadi 40,9 juta orang. Sementara penduduk asli di Jawa dan luar Jawa mencapai 59,1 juta pada tahun 1930. Itu artinya, 70 peratus penduduk Indonesia tinggal di Jawa dan Madura pada 1930.<sup>116</sup>

Pemerintah kolonial Belanda menilai tingkat kesejahteraan yang rendah penduduk Pulau Jawa itu disebabkan karena jumlah penduduk yang tumbuh cepat. Namun, pemerintah tidak memiliki alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan. Satu-satunya jalan yang diambil ialah melalui emigrasi. Tahun 1905, koloni-koloni Jawa yang pertama ditempatkan di Lampung. Pada tahun 1930, sudah ada 36.000 orang penduduk Jawa yang mengadu nasib di Lampung. Setelah itu, barulah dibuka tempat lain untuk transmigrasi.<sup>117</sup>

Situasi inilah yang dapat ditengarai sebagai perjumpaan antara Jawa dengan Lampung. Sangat dapat dipahami jika kemudian Lampung seperti Jawa kedua di luar Pulau Jawa. Proyek transmigrasi besar-besaran masyarakat Jawa ke Lampung tidak hanya semata-mata perpindahan penduduk, sahaja akan tetapi juga perpindahan budaya. Masyarakat Jawa yang berpindah ke Lampung juga membawa asal usul budayanya. Lapisan santri dari Jawa juga mengalami situasi yang sama dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Diantara mereka, banyak yang juga ikut berpindah ke tempat lain, termasuk Lampung. Awal mula kehadiran pesantren, -sebagai institusi pendidikan Islam yang lahir di Jawa- di Lampung dapat kita pahami dari situasi ini.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Ibid., hlm. 326-327.

<sup>117</sup> Ibid., hlm. 327.

<sup>118</sup> Ibid., hlm. 327

Berbeda dengan perkembangan pesantren di Jawa yang sudah ada sejak abad 18 M, kewujudan pesantren di Lampung baru dapat teridentifikasi pada tahun 1960-1970an. Mereka yang menjadi pimpinan Pondok Pesantren di Lampung adalah para santri pesantren di Jawa. Transmigrasi adalah salah satu pola yang menyebabkan banyaknya penduduk Pulau Jawa yang berpindah di Lampung. Bahkan sebahagian besar masyarakat Lampung adalah suku Jawa. Inilah yang kemudian menjadi sebab kenapa pesantren yang ada di Lampung hampir semuanya dikelola oleh “orang Jawa”.<sup>119</sup>

Salah satu santri yang menyeberang pulau adalah KH. Ahmad Sodiq . Kiai Ahmad Sodiq memimpin pesantren yang cukup memiliki pengaruh di Lampung, Darus Salamah di Brajadewa, Way Jepara, Lampung Timur. Kiai Sodiq dikenal sebagai tokoh yang cukup dekat dengan KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lebih dari tiga kali Gus Dur menziarahi pesantren itu, sama ada ketika acara rasmi l atau sekedar bersilaturahmi. Dengan tetap mempertahankan pola tradisional (tidak menyediakan sekolah formal), santri di pesantren ini hingga sekarang mencapai lebih dari 600 santri. Selain sebagai pimpinan pesantren Kiai Sodiq juga menjadi mursyid tarekat. Jamaahnya lebih dari 10.000 orang.<sup>120</sup>

Kiai Sodiq lahir di Kampung Jatisari, Kecamatan Kepung, Kawedanan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada 18 hari bulan Julai 1927. Kiai Sodiq kecil

---

<sup>119</sup> Temu bual Mahrus As'ad, 21 September 2013.

<sup>120</sup> Hingga 2013, ada sekitar 72 pesantren yang didirikan oleh alumni dari pondok pesantren ini. Para lulusan Pondok Pesantren Darus Salamah yang mendirikan pondok pesantren antara lain. K.H. Khusnan Mustofa Ghufron (alm) mendirikan Darul A'mal di Metro, K.H. Muchsin Abdillah (Darus Sa'adah Mojoagung, Gunungsugih, Lamteng), K.H. Nurcholis (Bandaragung, Terusanunyai, Lamteng), K.H. Nur Daim (Darus Salamah, Bandaragung, Terusanunyai, Lamteng), K.H. Sahlan (Darun Najah, Sekampung, Lampung Timur), K.H. Nasikhin (Darun Najah Brajaselebah, Lampung Timur), K.H. Wahib dan Muhid (Sumbersari, Way Jepara, Lampung Timur). Wawancara Imam Sibawaih (Putera KH. Ahmad Sodiq), 11 Mei 2013.

tumbuh dan berkembang seperti kebanyakan anak seumurnya. Namun, ketika masuk sekolah dasar (SD) (SR, ketika itu), umurnya sudah 16 tahun. Pendidikan formal itu pun hanya ditempuh hingga kelas III.<sup>121</sup>

Menginjak remaja, anak ketiga dari enam bersaudara ini mengikuti pelatihan-pelatihan ketenteraan. Maklum, ketika itu Indonesia tengah dijajah Belanda dan memerlukan banyak pejuang. Meskipun hanya setahun, Kiai Sodik lulus ujian keberanian dan kemahiran berperang. Sang kiai pun gembira dan memberitahukan hal itu kepada sang ibu. Malang, kegembiraan Sodik kecil tidak selari dengan sang Ibu, Puan Situn. Wanita yang melahirkan Kiai Sodik itu tak merestuinnya menjadi tentera. Dengan berat hati, Sodik akhirnya mengurungkan niatnya berjuang lewat militer dan memilih jalur agama. Ia kemudian memilih untuk belajar di Pondok Pesantren Darussalam Kencong yang jaraknya sekitar 3 kilometer dari rumahnya.<sup>122</sup>

Meski sang Ibu mengizinkan Sodik untuk belajar di pesantren pimpinan KH. Imam Faqih itu, akan tetapi ada tiga syarat yang diajukan: mencari bekal penghidupan sendiri, tetap membantu keperluan keluarga, dan tetap bekerja di rumah serta tidak boleh merantau.<sup>123</sup> Dengan tiga syarat itu, perjalanan Ahmad Sodik ke pesantren setiap hari ditempuh sambil berjualan angka muda dari rumah ke rumah hingga pasar.<sup>124</sup> Hal itu dilakukan hingga sembilan tahun. Selanjutnya, Ahmad Sodik pindah ke Pesantren pedes di Jombang, Jawa Timur, khasnya untuk memperdalam ilmu Alquran dan tarekat. Meskipun jarak dari rumahnya sekitar 34 kilometer, perjalanan ke tempat K.H. Romli Tamim itu ditempuh dengan berjalan kaki. Tiga

---

<sup>121</sup> Heri Wardoyo, et.al, *100 Tokoh Terkemuka Lampung, 100 Tahun Kebangkitan Nasional*, Bandar Lampung: Lampung Post, 2008, hlm. 80-83.

<sup>122</sup> Ibid.

<sup>123</sup> Ibid., hlm. 83

<sup>124</sup> Ibid., hlm. 83

tahun kemudian, ia mengajar di Pesantren Darussalam, tempat pertama kali ia menuntut ilmu agama. Pengabdian itu dijalankannya selama tiga tahun.<sup>125</sup>

Selain itu, mursyid tarekat ini berguru kepada K.H. Adlan Ali, pengasuh Pesantren Cukir, Jombang, Jatim. Sekitar tahun 1963, Suroso, adiknya yang menjadi transmigran di Brajadewa, Way Jepara, mengutus Bisri Mustofa, anak saudaranya, untuk meminta sang kiai ke Lampung. Sampai di Brajadewa, Ahmad Sodiq tidak langsung menjadi kiai. Kerana kedatangannya juga atas permintaan Goden allahyarham, Ketua Kampung setempat, dia lebih dahulu dipondokkan di rumahnya dan menjadi anggota rela.<sup>126</sup> Tetapi, jika malam, sang kiai ditugasi mengajar agama di surau dan dari rumah ke rumah. Setahun kemudian, tokoh itu diberi tanah wakaf desa seluas 0,5 ha. Di tempat itulah Ahmad Sodiq mengembangkan ilmu bersama Kiai Ismail. Kerana kepercayaan masyarakat untuk menjadikan anaknya sebagai santri terus bertambah, pembangunan asrama (baca: pesantren) pun dimulai.<sup>127</sup>

Pesantren Darus Salamah didirikan pada tahun 1963 dan diresmikan pada tahun 1965. Beliau ke Lampung hanya membawa kitab yang beratnya kurang lebih setengah kuintal. Kedatangannya ke Lampung tidak langsung membuka pondok, tetapi terlebih dahulu tinggal di surau. Masyarakat di sini curiga, orang dari Jawa ini curiga. Kitab itu dibungkus pakai kain. Masyarakat kemudian membukanya. Setelah diketahui bahawa isi dari kain itu ialah kitab, mereka kemudian mengambil kesimpulan bahawa orang tersebut boleh mengaji. Modal yang digunakan untuk menarik santri ialah ikan, memancing. Setelah ikan didapat, anak-anak kemudian dipanggil diajak makan ditempat ia menginap. Lama kelamaan anak-anak yang

---

<sup>125</sup> Temu bual Imam Sibawaih.

<sup>126</sup> Heri Wardoyo, et.al, *100 Tokoh*, hlm. 83.

<sup>127</sup> Temu bual Imam Sibawaih.

datang untuk makan bersama semakin ramai. Awalnya makan itu bermula waktu siang, kemudian ditukar waktu petang dan kemudian malam hari. Ketika bertujar pada malam hari itulah kemudian banyak diantara anak-anak itu yang menginap. Ketika mula menginap itulah mereka kemudian diajari membaca al-Qur'an.<sup>128</sup>

Tetapi dakwah kepada anak-anak tentunya berbeza dengan orang dewasa. Kepada mereka yang dewasa, Kiai Shodiq tidak menekankan fikah, tauhid atau tasawwuf akan tetapi fikah siyasah. Pada amnya masyarakat didaerah tersebut suka bermain judi. Ketika datang kepada mereka, banyak diantara masyarakat itu yang menanyakan tentang hukum bermain judi. "Pak Kiai, bagaimana hukum bermain judi?". Kiai Sodiq kemudian menjawab, "tidak apa-apa, yang penting solat."<sup>129</sup> Satu tahun kemudian, mereka mula solat berjamaah. Setelah melaksanakan solat berjamaah, masyarakat kembali ke aktiviti semula, bermain judi dan laga ayam. Kiai Sodiq tetap membiarkan perbuatan masyarakat itu. Yang penting solat. Tahun berikutnya, Kiai Shodiq meningkatkan kualiti dakwah dengan mengajarkan *mabaadi' fikahiyyah* atau dasar-dasar fikah. Disitulah dibahas masalah keharaman berjudi dan mereka kemudian meninggalkan kebiasaan itu.<sup>130</sup>

Pesantren, dengan segala sifat yang dilabelkan kepadanya, jelas merupakan magnet bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pesantren begitu antusias melibatkan diri dalam aktiviti politik. Sedar bahawa NU membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka kalangan pesantren di Lampung hampir

---

<sup>128</sup> Ibid.

<sup>129</sup> Pilihan Kiai Sodiq dengan menggunakan metode seperti ini tentu sahaja menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan kelompok Muslim Puritan. Mereka menganggap bahwa Kyai Sodiq itu kafir karena menghalalkan apa yang haram. Tentu saja Kiai Sodiq memiliki argumen kuat atas apa yang dilakukannya itu.

<sup>130</sup> Temu bual Imam Sibawaih.

semuanya berpusu-pusu membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dan disini memang patut diakui ada hubungan antara, Pesantren, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Jawa. Thohir bercerita jika suatu ketika saudaranya dari Jawa datang ke Sumatera (Lampung, red) hanya untuk memastikan bahawa ia ikut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).<sup>131</sup>

Sebenarnya, posisi politik NU itu sudah lama menjadi magnet di Lampung, termasuk di era kepemimpinan Suharto. Setiap momen politik di peringkat lokal, NU selalu dimintai pertimbangan sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengaruh luas. Thohir mengatakan;

“Namun NU di Lampung itu menjadi perhitungan. Dulu zamannya Pak Harto, orang Lampung itu jamaahnya kan NU. Sebelum *nyalon* bupati itu harus minta restu dari NU. Perhitungannya, agar Lampung tidak ada gejolak. Waktu reformasi hal itu masih kita rasakan”<sup>132</sup>

Tingginya kesedaran politik warga pesantren di masa awal (Pilihan Raya Umum 1999), menjadikan kerja-kerja konsolidatif PKB lebih mudah. Langkah strategik yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih pada upaya penegasan tentang bagaimana cara berpolitik yang selari dengan *Ahlussunnah wal Jama'ah*. KH. Khusnan Musthofa Ghufroon misalnya menjelaskan kepada jamaah di pesantren bahawa datang ke tempat pembuangan undi atau pemungutan suara (TPS) itu wajib hukumnya untuk melestarikan kepemimpinan. Tidak adanya pemimpin akan menyebabkan kekacauan di sebuah wilayah. Bahkan kampung sahaja mesti ada ketuanya. Kerana itu, pilihan raya merupakan bahagian dari kewajiban warga pesantren untuk memilih pimpinan.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> Temu bual Syamsudin Thohir, 21 September 2013.

<sup>132</sup> Ibid.

<sup>133</sup> Seperti dituturkan oleh Syamsuddin Thohir.

Pemahaman terhadap pentingnya berpolitik dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah menjadi salah satu pemasaran atau marketing politik yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dan ideologi *ahlu sunnah wal jama'ah* pada parti politik itu adalah PKB. Itu yang sering dicontohkan pada pelapis-pelapis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penekanan hal ini terus menerus dilakukan kerana faktanya pada pilihan raya umum 2004 dan ketika konflik mula melanda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), *nahdliyyin* mula merasakan kejenuhan ketika berbicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).<sup>134</sup>

Tentu sahaja hal itu bukannya tanpa tantangan. Parti Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menggunakan dalil yang sama iaitu Ahlussunnah wal Jamaah serta beberapa diantaranya menjadikan pesantren sebagai asasnya atau jangkarnya. Untuk menanggapi hal ini, aktivis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kemudian mengambil sejarah sebagai rujukan untuk mengantisipasi derasnya sokongan PPP. Menurut mereka, sejarah menunjukkan bahawa NU secara tegas menarik diri dari PPP. Dan NU kemudian membidani Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1998. Apalagi dalam kenyataannya, di tubuh PPP (pasca reformasi) banyak berkembang aliran-aliran keras yang tidak sesuai dengan paham moderatnya NU.<sup>135</sup> Terlebih lagi seringkali berpindahnya aktivis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke parti lain, semisal PPP, kerana faktor peribadi. Berpindahnya KH. Daroini Ali<sup>136</sup> dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke PPP pada pilihan raya umum 2014 dilatari oleh kekecewaannya terhadap KH. Ngaliman Marzuki.<sup>137</sup>

---

<sup>134</sup> Wawancara Amin Thohari.

<sup>135</sup> Wawancara Amin Thohari, Musa Zainuddin, 20 September 2013.

<sup>136</sup> KH. Daroini Ali adalah anggota DPRD Provinsi Lampung tahun 2004-2009 dari PKB.

<sup>137</sup> Temu bual Amin Thohari.



KH. Muchtar Ghozali pimpinan pondok pesantren Baitul Mustaqim mengatakan tingkat pragmatisme yang masih rendah di kalangan pesantren di Lampung juga menjadi keuntungan tersendiri bagi warga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Sebenarnya kalau di Lampung itu masyarakatnya *bloko suto* (apa adanya). Di Lampung menurut saya masih bisa dipoles. Kalau kita mau menggaet Kyai dengan jamaahnya itu bisa diperoleh oleh para politik. Coba di Jawa. Di Jawa kalau tidak ada uangnya *gak* bisa. Saya itu melihat sendiri bagaimana orang yang merintis agama disitu (baca: di Jawa) *nyalon* kebetulan dari PPP. Di tempat perjuangannya itu, sama sekali tidak ada yang mendukung. Alasannya kenapa karena tidak ada uang. Kalau di Lampung tidak muluk-muluk. Tinggal polesannya seperti apa. Yang jelas, kalau memang ada kader NU masuk ke politik PKB, itu karena ada hubungan emosional”<sup>138</sup>

Persoalannya, lanjut Ghozali, politisi-politisi di Lampung termasuk di dalamnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak nampak peluang ini. Sehingga banyak yang apatis. Tak sedikit juga akhirnya Kiai yang sudah malas bicara tentang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski sebenarnya, para kiai itu masih sangat menyayangkan jika suatu waktu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) benar-benar menjadi parti yang mandul dan tidak dapat menjadi saluran aspirasi warga Nahdliyyin. “*Tapi nek disawang, njengkel,*”<sup>139</sup> lanjut KH. Muchtar Ghozali. Meski begitu Muchtar Ghozali menambahkan sejelek-jeleknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tetap saja parti ini memiliki manfaat (bagi warga NU). Kelemahan warga pesantren dan kalangan NU pada umumnya saat akan berkecimpung di dunia politik adalah mereka memiliki moral tapi tidak punya modal.<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup> Temu bual KH. Muchtar Ghozali, 9 Mei 2013.

<sup>139</sup> Bahasa Jawa yang artinya, Tapi kalau dilihat-lihat marah.

<sup>140</sup> Temu bual KH. Muchtar Ghozali.

Kewujudan pesantren sebagai komuniti inti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengantarkan 8 orang menduduki kerusi DPRD Provinsi Lampung pada tahun 1999 dan 6 orang di tahun 2004. Musa Zainuddin, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung (2006-sekarang) mengatakan bahawa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) konsisten dengan menjadikan nahdliyyin sebagai basis. Sejak kepemimpinannya, ia terus mengawal dan mempertahankan kyai, karena memang kyai harus terus dilakukan pendekatan. Meskipun pada kenyataannya ada juga kyai yang tidak mau terjun langsung dalam politik. Kalau berbicara pondok pesantren, maka di situ ada figur kyai. Disitulah simpul nahdliyyin berada. Atas dasar itu, maka pesantren tetap menjadi prioritas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk meraup suara.<sup>141</sup>

Meski kekuatan inti ada di pesantren, tetapi Musa tidak menafikan adanya perluasan jejaring untuk meraih suara. Musa mengatakan;

“Misalnya saya pernah di senat mahasiswa, kemudian di PMII, kan itu jaringan, sekolah saya mulai SMP sampai sekarang sekolahnya di Lampung, ada teman SMP yang bukan NU ada yang jadi lurah, ada yang camat, kan ini secara diam-diam (bisa diajak bergabung)”<sup>142</sup>

Realiti pesantren juga mesti dilihat dari sisi lain. Meski ia memiliki loyaliti, tetapi ada fakta bahawa mereka berhadapan dengan keperluan-keperluan yang bersifat asas. Musa menuturkan, ada keperluan yang harus dipenuhi pesantren untuk banyak hal seperti pembangunan, pelaksanaan kegiatan berskala besar (pengajian dll) serta keperluan lainnya. Sementara sumber-sumber itu sangat terhad. Campur

---

<sup>141</sup> Temu bual Musa Zainuddin, 20 September 2013.

<sup>142</sup> Temu bual Musa Zainuddin.

tangan pemerintah terhadap pesantren juga sangat terhadap jumlahnya. Peruntukkan anggaran ke pesantren sangat minim.<sup>143</sup>

Menghadapi keadaan ini, maka yang dapat dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah mengawal peruntukkan yang pro-pesantren. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ada di DPRD Provinsi dan Kabupaten harus jeli melihat keadaan pemilinnya atau konstituennya, yaitu pesantren. Bagaimana misalnya memperjuangkan peruntukan untuk pembenahan fisik pesantren, menambah bangunan kelasnya, membuat perigi gerudi dan lainnya.<sup>144</sup>

Komitmen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap NU ditunjukkan misalnya di wilayah Lampung Timur. KH. Sahlan, Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung Timur tahun 1999 mengatakan sumbangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap NU itu sangat besar, terutama dalam bentuk materi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat itu misalnya mendanai semua keperluan ketika GP Anshor melaksanakan halaqoh se-Sumatera. Bangunan Pengurus Cabang NU Lampung Timur juga hasil dari pada perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setempat.<sup>145</sup>

Dalam kurun waktu tahun 1999-2009 hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan pesantren sangat erat, seperti keluarga. Jemputan hanya dikirim melalui *short message service* (SMS) dan semuanya hadir. Meski tidak menjadi anggota DPRD, pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baik Syuriyah maupun

---

<sup>143</sup> Temu bual Musa Zainuddin.

<sup>144</sup> Temu bual Okta Rijaya, 23 Maret 2013.

<sup>145</sup> Temu bual KH. Sahlan, 11 Mei 2013.

Tanfidznya sangat disegani, terutama oleh ahli atau kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang duduk di DPRD. Menurut Musa;

“Saya sering perintahkan teman-teman di DPRD. Tolong potong gaji buat pondok-pondok yang ulang tahun. Dan benar, gaji mereka dipotong untuk biaya-biaya acara. Paling satu juta cukuplah. Pernah juga satu waktu anggota DPRD sama sekali tidak menerima gaji, saat kita kedatangan KH. Hasyim Muzadi”.

Untuk memperkuat proses pendidikan terhadap pesantren, aktivis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kerap menyisipkan pesan-pesan itu dalam aktivitas yang diadakan oleh kalangan pesantren. Musa misalnya mencontohkan, dalam kegiatan yang dibuat oleh NU entah dalam bentuk pengajian, halaqah dan sebagainya ia kerap mengoptimalkan kegiatan-kegiatan tersebut.<sup>146</sup> Saat ada pesantren yang mengadakan haul dan mengundang mereka, biasanya dirinya diminta untuk memberi pidato atau sambutan. Disinilah ia punya kesempatan untuk memberikan pendidikan politik. Momen tersebut sebenarnya tak hanya dimanfaatkan oleh para politisi, tetapi juga pemerintah. Pemerintah yang cerdas juga sering menumpang untuk mensosialisasikan program mereka.<sup>147</sup>

Musa memahami bahawa kegiatan keagamaan di kalangan NU sangatlah beragam. Ada banyak acara keagamaan yang kerap mendatangkan masa banyak. Disitulah ia sering memberi sambutan atau semacam *taushiyah* politik. Dengan panjang lebar Musa mencontohkan salah satu esensi taushiyah politik yang disampaikannya pada tahun 2013.

Sering saya mulai begini. “Pemilu itu pesta demokrasi, nanti tanggal 9 April 2014 seluruh warga Indonesia akan menarik mandatnya. Tinggi mana daulat rakyat sama pejabat? Ya tinggi rakyat. Ya memang begitu karena kedaulatan untuk rakyat. Nanti 9 April itu akan menarik mandat

---

<sup>146</sup> Temu bual Musa Zainuddin.

<sup>147</sup> Ibid.

2009, dan menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Contoh Gus Dur membuat reformasi. Namanya pemerintah kan juga misi dan sasaran. Salah satu komitmen reformasi adalah Indonesia terbebas dari korupsi, pertanyaannya saya, sekarang korupsi sudah hilang belum? Belum semua bahkan semakin parah. Dulu ibu-ibu waktu memberikan mandat nyesel tidak. Nah 2014 ini jangan sampai menyesal, sehingga ibu-ibu jangan sampai salah pilih.” Dari sini baru masuk PKB. Ini termasuk pendidikan politik sekaligus mengajak masyarakat untuk cerdas.<sup>148</sup>

Musa menambahkan bahwa meski lahir dari kalangan tradisional, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus menjadi partai modern. *Pertama*, pengambilan keputusan di partai tidak bisa bersandar pada individu. *Kedua* pentadbiran parti yang merupakan bahagian dari penguatan. Parti ini bekerja sebagai penyalur aspirasi, sehingga banyak tugasnya. Tentu sangat menyusahkan jika pengurusan tidak berjalan. *Ketiga* kepemimpinan. Pemimpin yang baik adalah yang memiliki integriti dan visi yang jelas. Visi ke-NU-an dan kebangsaan harus lengkap. Dari tiga inilah membangun parti ini menjadi parti yang kuat.<sup>149</sup>

Soal figur kiai, Musa mengatakan bahawa kiai itu mesti ditempatkan pada had yang memang ia mampu. Untuk mengatur komuniti parti yang latar belakangnya beragam, maka perlu pembahagian peran. Kalau perannya disamaratakan maka bukan tidak mungkin mesin parti tidak akan berjalan. Pelaksanaan rapat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelum ia memimpin, cukup dilaksanakan di rumah kiai sahaja. Hal tersebut mula ia transformasikan dengan membuat pejabat untuk pentadbiran. Kepentingan yang ditampung juga tidak hanya mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sahaja, tetapi juga dari kampus lainnya.<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup> Temu bual Musa Zainuddin.

<sup>149</sup> Temu bual Musa Zainuddin.

<sup>150</sup> Temu bual Musa Zainuddin.

Bagi Musa, ini adalah bahagian dari pendidikan politik. Menurutnya, pendidikan politik itu adalah bagaimana menerangkan soal pembahagian peran, pentadbiran parti dan visi dengan cerdas. Sasarannya adalah memahami kalangan pesantren bahawa suara mereka sangat menentukan pemimpin ke depan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kemudian melakukan pengawalan terhadap suara pesantren ini dengan mendatangi. Tidak dapat dinafikan, bahawa ada penurunan dalam aktiviti politik dari semua elemen yang ada di pesantren. Salah satu alasannya, kata Musa adalah kerana para politisi tidak tuntas dalam memberikan pendidikan politik yang baik. Mereka kurang tepat dalam memberikan pendidikan politik sehingga menimbulkan kekecewaan. Dan tidak hanya pondok pesantren saja yang merasa kecewa tetapi juga masyarakat secara luas. Tidak hanya dari pondok pesantren tetapi juga masyarakat. Ketika para calon anggota legislatif itu melakukan kampanye, mereka tidak berusaha untuk realistis sehingga tidak memberikan pendidikan politik yang baik.

Yang terjadi kemudian anggota legislatif kerap menarik masyarakat ke dalam pragmatisme politik. Misalnya dengan membahagikan keperluan asas dan wang. Inilah yang menunjukkan betapa politisi itu tidak memberikan pendidikan politik yang tuntas. Walaupun dilanda konflik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Lampung tetap dapat wujud meski perolehan suara untuk DPRD Provinsi berkurang dua kerusi. Tentang hal ini, Musa mengatakan bahawa ada dua alasan mengapa hal itu terjadi. Disamping masih menjalarnya euforia reformasi, suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masih besar juga didasarkan atas kuatnya keinginan ulama NU yang ingin terjun ke politik praktis. Pada tahun 1999 hal tersebut menjadi kekuatan yang utuh. Setelah berkonflik banyak yang kemudian

berpindah dan yang berpindah parti ini punya potensi untuk mengancam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Makanya konflik harus sedapat mungkin dikurangkan. Makanya, ketika ia memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung, pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menggunakan sistem aklamasi.

Strategi yang digunakan oleh NU saat berhadapan dengan orde baru adalah dengan mengatakan bahwa “NU itu netral, ada di mana-mana dan tidak ada di mana-mana.” Dalam situasi organisasi yang belum kokoh, maka model aklamasi inilah terapinya. Demokrasi di Amerika Serikat itu tidak menimbulkan konflik kerana prosesnya sudah sihat. Syaratnya sihat itu berat kerana ini berhubungkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Demokrasi akan baik kalau keperluan mendasar masyarakatnya sudah terpenuhi, perut kenyang. Ukuran demokrasi itu jelas akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan.

Musa menambahkan bahawa konflik kerap kali menimbulkan perpecahan di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB.) Karena itu banyak kiai yang kemudian membenci Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kerana dianggap tidak sesuai dengan garis perjuangan NU. Terhadap hal tersebut Musa memiliki strategi dengan mengajak berbicara kiai-kiai tersebut.

“Saya sebenarnya punya terapi yang mujarab hasil dialog saya dengan para kiai. Ada kyai sepuh di lampung barat yang tadinya benci banget sama PKB sampai-sampai *ngapain* kamu bawa-bawa PKB. PKB mau dibubarin. Saya kemudian menemui kiai tersebut. Pak kiai, kalau soal agama saya ta'dzim tapi soal politik pak kiai harus ingat saya. Saya bilang Pak kiai kan cinta Gus Dur, saya juga. Sama. Tapi menurut saya, cara pak kiai mencintai gus dur keliru. Kalau saya sudah benar. Kalau saya cinta Gus Dur, saya ingin melanjutkan perjuangan Gus Dur. Tapi kiai cinta Gus Dur tapi tidak mau melanjutkan perjuangannya. Menurut saya PKB ini salah satu buah perjuangan Gus Dur. Sekarang tunjukkan ke saya bukti-bukti kalau Gus Dur membenci PKB. Atau bahkan Gus Dur pernah membubarkan PKB. Kalau kyai

bisa membuktikan kepada saya, besok saya akan mengundang wartawan, saya akan mengumumkan PKB Lampung ini bubar. Gimana pak kiai. Setelah pulang saya diundang lagi, sekarang dia juga ikut kampanye. Ini namanya kreasi”.<sup>151</sup>

Jika model kempen ini dilakukan kepada banyak kiai di Lampung, maka menurut Musa, hal ini akan sangat membantu perjuangan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Disitulah dia menekankan kepada fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahawa percakapan dengan kiai, tidak hanya melibatkan logika, tetapi juga hati. Karena bagaimanapun juga kyai adalah simpul, maka simpul ini harus diamankan.<sup>152</sup>

Meski begitu, tidak semua yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan para politisi pada umumnya bisa diterima oleh pesantren. Syaikhul Ulum, pengasuh Pesantren Walisongo mengatakan bahwa harapan pesantren terhadap partai itu adalah dengan melakukan pendekatan yang betul-betul persuasif.<sup>153</sup> Artinya, pendekatan peribadi dengan partai pesantren dan itu tidak hanya dilakukan ketika momen-momen tertentu sahaja. Ketika terjadi seperti itu warga pesantren akan merasa jenuh, karena kehadiran partai hanya pada ketika momen politik sahaja setelahnya juga ditinggal.

Setidaknya, pesantren dapat mengenal pengurus partai. Itu minimal. Karena banyak sekali santri-santri yang tidak mengenal pesantren yang selama ini dekat dengan mereka seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau PPP. Malah, lanjut Ulum ada pengurus cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih

---

<sup>151</sup> Temu bual Musa Zainuddin.

<sup>152</sup> Temu bual Musa Zainuddin.

<sup>153</sup> Temu bual Syaikhul Ulum, 9 Mei 2013.



banyak melakukan pendekatan juga Partai Golongan Karya (Golkar). Oleh dua partai tersebut, kalangan pesantren merasa diperhatikan.<sup>154</sup>

Hal yang sama dirasakan oleh Gus Rony, pengasuh Pesantren Baitul Mustaqim, Lampung Tengah.<sup>155</sup> Kiai-kiai merasa banyak yang ditinggal oleh fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Padahal mereka sebenarnya memiliki kebanggaan kerana memiliki wakil di DPRD. Karena itu silaturraim kepada kiai-kiai menjadi penting. Dalam hubungannya dengan politik, kata Rony ada tiga model kiai. Yang pertama ada kyai ojeg. Ojeg itu angkutan umum sepeda motor. Ia melayani semua penumpang. Kiai ojeg adalah analogi untuk menggambarkan model kiai yang menerima dan mengamini semua parti politik yang ada padanya. Lalu model kedua adalah kiai *ujug-ujug* (tiba-tiba). Dalam momen-momen politik ada orang yang tiba-tiba menjadi kiai. Padahal dalam kehidupan keseharian sebelumnya, ia tidak berceritakan memiliki riwayat kekiyaian atau melakukan kerja-kerja seperti halnya dilakukan oleh kiai pada umumnya. “Kiai” ini memanfaatkan momentum dengan tiba-tiba menjadi “kiai”. Tipologi yang terakhir adalah kiai *ajeg* (tetap). Kyai ini mungkin tipe ideal, kiai yang istiqomah atau konsisten. Dalam percaturan politik, ia berusaha untuk konsisten. Tidak terjebak dalam pragmatisme politik, tetapi juga tidak apolitis. Pertimbangan kemaslahatan adalah yang utama bagi kiai model tersebut.<sup>156</sup>

---

<sup>154</sup> Temu bual Syaikhul Ulum.

<sup>155</sup> Temu bual Gus Rony, 9 Mei 2013.

<sup>156</sup> Temu bual Gus Rony,

## **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB ) Sebagai Agen Pengenalan Politik Bagi Pesantren**

Sebagai wakil pesantren, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah pasti tidak akan melupakan pesantren sebagai basis utamanya. Bahagian bab ini akan menggambarkan bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjalankan fungsinya dalam melakukan sosialisasi terhadap pesantren. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ketika berbicara dengan lingkungan yang merupakan komuniti awal mereka. Bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjelaskan kepada kalangan pesantren bahawa mereka adalah saluran politik yang mewakili suara pesantren.<sup>157</sup>

Sosialisasi politik merupakan salah satu fungsi parti politik. Pada prinsipnya, sosialisasi adalah cara agar seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.<sup>158</sup> Sosialisasi merupakan cara untuk mengenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut sebuah negara.<sup>159</sup>

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh sebuah parti politik memiliki banyak tujuan. Tetapi setidaknya ada dua hal pokok yang menjadi matlamat dari sosialisasi oleh parti politik. *Pertama*, sosialisasi dalam pengertian untuk mengenalkan ideologi, program serta visi dari sebuah parti politik. Kedua, sosialisasi sebagai upaya untuk penguatan basis sokongan. Jika matlamat pertama dilakukan oleh parti

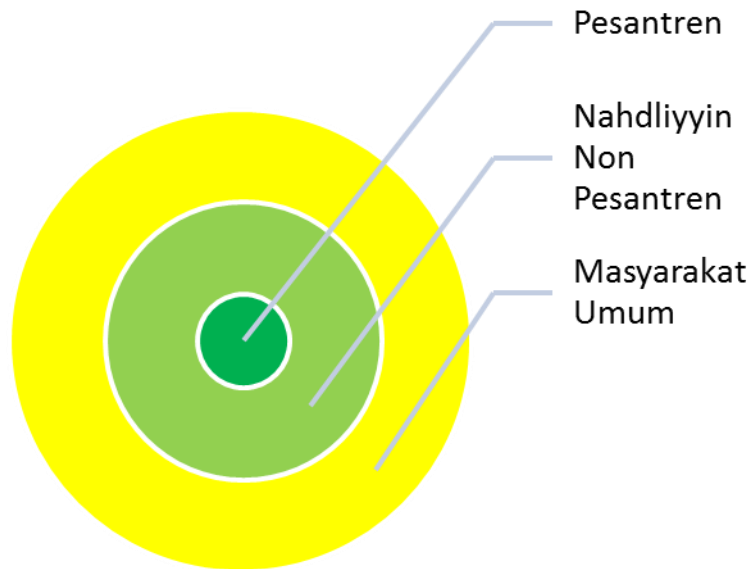
---

<sup>157</sup> Temu bual Musa Zainuddin.

<sup>158</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar*, hlm. 407.

<sup>159</sup> Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 94.

politik kepada pemilih atau konstituen baru atau lebih umum, matlamat kedua dialamatkan pada basis penyokong utama.



**Rajah 4.4:** Peta Sosialisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Rajah 3.4 menunjukkan tingkatan masyarakat yang menjadi target dari sosialisasi politik yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pembezaan level konstituen ini akan membezakan strategi kempen politik yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).<sup>160</sup> Termasuk isu dan nomenklatur politik yang digunakan tentu sahaja berbeza pula. Selain berbeza pada kata-kata yang digunakan, isu yang dimunculkan dalam dua momen politik juga tentu sahaja berbeza. Seperti diketahui, hingga pilihan raya umum tahun 2009, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) banyak dilanda masalah dalaman. Kerananya strategi sosialisasi politik ke pelbagai elemen salah satunya juga dengan mengemas konflik tersebut sebagai sesuatu yang produktif bagi parti.

---

<sup>160</sup> Temu Bual Okta Rijaya.

Isu utama yang dibangun oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam melakukan sosialisasi bagi kalangan umum adalah soal ideologi parti yang terbuka.<sup>161</sup> Bagi masyarakat Lampung, ini sangat penting. Keterbukaan ini menjadi pintu masuk untuk menarik orang ramai dari pelbagai lapisan. Meski tentu sahaja persoalannya tidak mudah, kerana hampir semua parti terutamanya parti nasionalis juga berkempen dengan tema yang senada.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai penerjemahan idea Gus Dur dalam konteks politik, demokrasi dan pluralisme menjadi dasar bagi upaya untuk mengawal parti ini agar tetap menampung atau mengakomodir kepentingan siapapun. Dengan menjadikan Pancasila (bukan Islam, red) sebagai asas parti, maka keterbukaan itu menemukan landasannya. Keterbukaan ini tidak hanya dalam soal etnik, tetapi juga agama dan ideologi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyediakan justifikasi akan keterbukaan tersebut.<sup>162</sup>

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap kalangan NU non pesantren barangkali lebih mudah dilakukan.<sup>163</sup> Meski dari rahim NU tidak lahir satu parti pada tahun 1999, tetapi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih sangat dekat dengan NU. Secara historis NU membidani kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Itu yang tidak dilakukan oleh NU kepada parti lainnya, meski ada orang NU di dalamnya.

---

<sup>161</sup> Temu Bual Musa Zainuddin.

<sup>162</sup> Ibid.

<sup>163</sup> Temu Bual Syamsuddin Thohir.

Terhadap elemen ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tinggal meyakinkan bahawa parti ini merupakan kepanjangan suara dari NU. Namun, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga harus menyedari bahawa hubungan mereka dengan NU tidak bersifat struktural. NU tetaplah organisasi masyarakat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap dalam posisinya sebagai parti politik. NU hanya membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tetapi setelah itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berjalan secara independen, meski dalam praktiknya NU masih kerap menjadi rujukan bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam menelurkan kebijakan yang bersifat strategik.<sup>164</sup>

Bahagi kalangan pesantren, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentu sahaja adalah “partinya para santri.” Memang tidak semua kalangan pesantren memberikan suaranya kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tetapi pada pilihan raya tahun 1999, hampir semua pesantren di Lampung memberikan undinya pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). KH. Syamsuddin Thohir mengatakan bahawa di Lampung itu tidak ada pesantren yang bukan NU, dan milih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB.)<sup>165</sup> Perubahan pilihan politik itu terjadi ketika ada konflik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meski sesungguhnya perubahan itu ada di semua parti.

Persoalan pelik terjadi ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilanda konflik. Ini juga berimbas pada strategi sosialisasi mereka di pesantren. Seperti diketahui setidaknya ada kurang lebih tiga kali konflik dalaman Partai Kebangkitan Bangsa( PKB) yang cukup mengganggu roda parti ini. *Pertama*, adalah konflik dengan Matori Abdul Djilil tahun 2001. *Kedua*, konflik Gus Dur dengan kelompok

---

<sup>164</sup> Temu Bual Okta Rijaya.

<sup>165</sup> Temu bual KH. Syamsuddin Thohir, 21 September 2013.

Alwi Shihab-Choirul Anam tahun 2005-2007. *Ketiga*, konflik Gus Dur-Muhaimin Iskandar tahun 2008.<sup>166</sup>

Konflik pertama antara Gus Dur dan Matori Abdul Djalil merupakan bahagian awal dari "tradisi konflik" dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Konflik ini dipicu oleh perbezaan "ijtihad politik" antara Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Matori Abdul Djalil dan Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid dalam menyikapi Sidang Istimewa (SI) MPR satu tahun 2001. Sebagaimana diketahui SI MPR pada akhirnya menurunkan Gus Dur dari kerusi kepresidenannya pada tanggal 23 Juli 2001.

Konflik dalaman Gus Dur dengan Matori Abdul Djalil dimulai dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Matori atas intruksi DPP agar tidak menghadiri sidang istimewa MPR tahun 2001. Sebagai hukuman, Matori diberhentikan dari jawatannya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz. Keputusan pemberhentian tersebut dilakukan melalui prosedur dan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan AD/ART sehingga mempunyai landasan hukum yang kuat.<sup>167</sup>

Dipecat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), politisi asal Salatiga, Jateng yang sempat menjadi Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri itu, kemudian bersama teman-temannya, seperti Abdul Kholik Ahmad,

---

<sup>166</sup> Helmy Faishal Zaini (ed), *Khidmat Kami Bagimu Negeri: Laporan Kinerja Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (FKB-DPR RI) 2005-2006*, Jakarta: FKB DPR-RI, 2007.

<sup>167</sup> Ibid, hlm. 118-119.

Asikin Kaharudien, dan Isa Mukhsin mendirikan Partai Kejayaan Demokrasi (PKD). Namun, PKD gagal mengikuti pemilu.

*Kedua*, konflik Gus Dur dan Alwi Shihab-Choirul Anam. Konflik dalaman yang kedua ini memiliki modus yang hampir sama dengan modus dalam konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Matori. Konflik diawali dari pemecatan terhadap Alwi Shihab dan Syaefullah Yusuf dari posisi Ketua Umum dan Setiausaha Agung DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).<sup>168</sup> Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf sendiri terpilih dalam Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB di Yogyakarta pada tanggal 17-19 Januari 2002.<sup>169</sup> Namun selanjutnya keputusan tersebut kemudian melebar menjadi sebuah konflik institusional. Alwi shihab juga membawa kes ini ke mahkamah melalui sebuah gugatan perdata, sama seperti yang dilakukan Matori.

Pada saat proses hukum ini sedang berjalan, DPP PKB menyelenggarakan Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Semarang pada tanggal 16-18 April 2005. Muktamar ini diikuti oleh seluruh jajaran pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota, termasuk diikuti oleh aktivis-aktivis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada saat itu terdapat beberapa tokoh parti yang menyatakan *mufaroqoh* (memisahkan diri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan selanjutnya mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tandingan. Dengan disokong oleh 17 ulama NU, akhirnya mendirikan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di Pesantren Langitan, Tuban, 31 Maret 2007.<sup>170</sup>

---

<sup>168</sup> Ibid, hlm. 122.

<sup>169</sup> FKB DPR-RI, *Mendayung di Pusaran*, Jakarta: FKB DPR-RI, 2004, hlm. 207.

<sup>170</sup> Ibid.

Ketiga, konflik Gus Dur dan Muhaimin Iskandar.<sup>171</sup> Yang terjadi di lapangan ialah saling klaim, saling gugat, dan saling menyudutkan. Ada dua kubu yang mengatasnamakan diri sebagai pengurus sah parti berlambang bintang sembilan tersebut. Pertama kubu Abdurrahman Wahid dengan para penyokongnya seperti Ketua Dewan Tanfidz Ali Masykur Musa, Setiausaha Agung Yenny Wahid, Moeslim Abdurrahman, Sigit Haryo Wibisono, Effendy Choirie, dan Arifin Junaidi. Mereka mengadakan Muktamar Luar Biasa (MLB) pada 30 hari bulan April sampai 1 hari bulan Mei 2008, di Parung Bogor, Jawa Barat. Dalam MLB kubu Gus Dur, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dipecat dari jawatannya sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan digantikan Ali Masykur Musa.

Tidak mahu kalah, kubu kedua yang dimotori Muhaimin Iskandar juga mengadakan MLB tandingan di Hotel Mercure Ancol 2-4 Mei 2008. Beberapa pelapis dan kader terbaik PKB yang selama ini dikenal setia kepada Gus Dur, berbelok menyokong Muhaimin. Sebut sahaja Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy, Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno.<sup>172</sup>

Sejumlah kader di legislatif juga secara terang-terangan menyatakan diri berada dalam gerbong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ditarik Cak Imin. Mereka antara lain Nursyahbani Katjasungkana, Ida Fauziah dan Marwan Jafar. Kisruh di rumah tangga parti yang ditubuhkan tahun 1998 ini, bererti yang ketiga sepanjang sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).<sup>173</sup> Konflik lahir kerana tokoh parti memutuskan berhadapan dengan Gus Dur. Dalam dua kes sebelumnya (Gus

---

<sup>171</sup> Ibid.

<sup>172</sup> Ibid.

<sup>173</sup> Ibid.



Dur-Matori dan Gus Dur-Alwi), Gus Dur selalu menjadi pemenang. Tapi konflik terakhir ini akhirnya dimenangkan oleh Muhaimin.

Rentetan konflik yang panjang itu sedikit sebanyak mengurangi kepercayaan masyarakat pesantren kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Beberapa pesantren akhirnya memilih untuk berpindah haluan. Di Lampung juga demikian. Efek yang besar timbul dari konflik Gus Dur dan Muhaimin Iskandar. KH. Daroini Ali, tokoh kharismatik mantan anggota DPRD Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpindah ke PPP.<sup>174</sup> Meski sebahagian besar masih tetap bertahan di PKB, beberapa pesantren akhirnya memilih untuk menjaga jarak dari kancah politik.

Lalu bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan sosialisasi politik di pesantren. Ada dua hal yang akan penulis bahas disini. Pertama, soal isu dan Kedua, masalah strategi yang dibangun oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pilihan raya umum tahun 1999 relatif lebih ringan bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam membangun citra di pesantren.<sup>175</sup> Selain kerana euforia demokrasi yang masih sangat kuat terasa, tahun 1999 kekuatan pesantren masih terpusat di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan fakta semacam itu maka sosialisasi isu di pesantren cenderung lebih mudah. Tema “parti terbuka,” “milik warga NU,” “pengibar panji Ahlussunnah wal Jamaah” lebih mudah diterima oleh kalangan pesantren. Sebenarnya bukan hanya semata-mata soal isu yang menjadikan parti ini mengakar kuat di pesantren, tetapi faktor sejarah dan reformasi yang memungkinkan semuanya berjalan dengan mudah.

---

<sup>174</sup> Temu bual KH. Syamsuddin Thohir, 21 September 2013.

<sup>175</sup> Temu Bual Qudratullah Shodiq, 21 September 2013.

Di level strategi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentu mesti dapat menjadikan warga pesantren benar-benar memiliki partai ini. Salah satu caranya ialah dengan merekrut wakil pesantren agar berkiprah di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu anggota DPR RI yang mewakili Lampung adalah Umar Anshori putera KH. Khusnan Musthofa Gufon.<sup>176</sup> Ini adalah contoh bagaimana strategi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan sosialisasi kepada pesantren, yaitu dengan merekrut keluarga pesantren untuk menjadi ahli Jawata Kuasa dalam partai. Rekrutmen keluarga pesantren merupakan bentuk am yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ketika melakukan sosialisasi terhadap pesantren.

### **Fungsi Artikulasi: Strategi dan Peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Membangun PEMBERDAYAAN EKONOMI**

Fungsi artikulasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan penulis fokuskan pada isu ekonomi, bagaimana partai berperan dalam membangun dan menjalankan fungsi ekonominya, terutama di pesantren. Meskipun begitu tentu sahaja penulis melihat bahawa gerak kerja ekonomi yang merupakan bahagian dari fungsi artikulasi ini barangkali tidak terlalu banyak diperankan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di pesantren.<sup>177</sup> Sebahagian besar pesantren tidak terlalu menggantungkan nasibnya kepada institusi politik seperti halnya partai politik. Gambaran itu setidaknya dapat dijumpai di beberapa pesantren besar di Jawa Tengah seperti Maslakul Huda (Pati) dan Pesantren Sidogiri di Jawa Timur.

---

<sup>176</sup> Ibid.

<sup>177</sup> Temu Bual KH. Ngaliman Marzuki.

Menggali peran serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pembangunan ekonomi pesantren dilatarbelakangi oleh dua hal. *Pertama*, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan parti yang memiliki hubungan langsung dengan dunia pesantren. *Kedua*, ada harapan atau ekspektasi dari pesantren untuk menunggu sumbangan santri-santrinya itu kepada almamaternya.<sup>178</sup> Gambaran utama tentang peran pesantren di dalam masyarakat dapat dilihat setidaknya dari tiga fungsi utama. *Pertama*, sebagai pusat pelapisan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*). *Kedua*, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*). *Ketiga*, sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*). Dan fokus yang perlu menjadi bahan kajian disini ialah fungsi ketiga dari pesantren tersebut.<sup>179</sup>

Secara umum, poros kekuatan pesantren ada dalam tiga tungku utama; kiai, santri dan proses pendidikan. A. Halim dalam “Menggali Potensi Ekonomi Pesantren” menggambarkan tentang kekuatan di masing-masing poros tersebut.<sup>180</sup> Peran kiai dalam pesantren menjadi sangat unik karena ia adalah pemimpin pesantren. Perkembangan sebuah pesantren akan sangat ditentukan oleh peran dan arahan dari kiainya. Dalam konteks pengembangan ekonomi pesantren, maka kiai setidaknya memiliki tiga kekuatan; ilmu, kepercayaan dan jiwa kewirausahaan.

Kiai bagaimanapun juga adalah figur yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin informal.<sup>181</sup> Pada masyarakat yang memang masih sangat kuat budaya paternalistiknya, pemimpin informal sangat dihargai tinggi oleh masyarakat. Dalam

---

<sup>178</sup> Temu Bual Laily Masyitoh.

<sup>179</sup> Abdul Halim, *Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren*, dalam A.Halim, et.al (ed), *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, hlm. 221-230.

<sup>180</sup> Ibid.

<sup>181</sup> Ibid.

konteks ekonomi, kiai yang memimpin pesantren itu sejatinya adalah orang yang telah mandiri secara ekonomi seperti menjadi seorang petani, peniaga. Ini berarti sejak awal kiai-ulama telah mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh, tidak hanya dari aspek mental, tetapi juga sosial dan ekonomi. Jiwa dan semangat *entrepreneurship* inilah yang mendasari kemandirian perekonomian pesantren.<sup>182</sup>

Potensi ekonomi berikutnya ialah santri, murid atau siswa. Halim menjelaskan bahawa potensi ekonomi yang dimiliki santri ini dalam kapasitasnya yang kerap kali memiliki potensi yang sedia ada. Santri banyak yang memiliki bakat seni kaligrafi, pertukangan, tilawah al-Qur'an dan lainnya. Potensi ini yang mestinya dapat ditangkap untuk kemudian diarahkan dan disalurkan. Pesantren bahkan boleh mewedahi bakat ini dan kemudian menjadikan potensi santri ini sebagai daya tawar atau faktor pembeza dari sebuah pesantren.<sup>183</sup>

Poros pesantren yang ketiga adalah pendidikan itu sendiri.<sup>184</sup> Telah diketahui, bahawa dalam sebuah pesantren meniscayakan adanya proses pendidikan yang bersepadu. Pesantren tidak hanya melaksanakan proses pendidikan, tetapi juga didalamnya menyediakan segala hal yang berhubungan dengan kemudahan pendidikan seperti Kitab, uniform Pesantren, perlengkapan kebersihan dan lain-lain. Disamping itu, pesantren mengenal sistem penarikan uang bulanan atau *syahriyyah*. Uang bulanan dikelola oleh pengurus. Sebahagian dibelanjakan untuk keperluan rumah tangga pesantren dan sebahagian lainnya disimpan untuk tabung. Biasanya tabung ini digunakan untuk memperingati hari-hari besar, haul pimpinan pesantren atau pelepasan santri kelas Aliyah di akhir tahun.

---

<sup>182</sup> Ibid.

<sup>183</sup> Ibid.

<sup>184</sup> Ibid.

Selain tiga poros kekuatan ekonomi diatas, penguatan ekonomi pesantren dimungkinkan kerana pesantren memiliki pengguna atau konsumen langsung. Selain santri seperti yang telah disinggung sebelumnya, pesantren memiliki pengguna lain, iaitu masyarakat yang berada disekitar lingkungan pesantren. Ikatan paternaliti semakin menguatkan hal tersebut. Ekonomi pesantren pada perkembangannya memiliki potensi untuk menjadi ekonomi berbasiskan rakyat. Model perekonomian seperti ini nyata dapat bertahan ketika krisis melanda. Industri kecil dan menengah seperti *home industry* sangat berpotensi memiliki kekuatan untuk bertahan. Disini, pesantren berpotensi untuk menjadi lembaga yang berbasis rakyat.<sup>185</sup>

Kewujudannya di tengah-tengah masyarakat membuat pesantren memiliki kapasiti untuk menjadi magnet bagi lingkungan sekitarnya. Daya tarik pesantren, tentu sahaja kerana ada kiai didalamnya. Dengan begitu, maka pengguna pesantren tidak hanya santri dan elemen-elemen sahaja yang ada didalamnya tapi juga masyarakat yang berada disekitar pesantren.<sup>186</sup> Meskipun begitu, bukan bererti pengembangan ekonomi didunia pesantren tak ada cabaran. Pesantren kerap menjadi tempat bagi keluarga dekat kiai, baik anak, cucu dan mereka yang masuk dalam kategori *dzurriyah*. Mereka inilah yang biasanya mengambil peran untuk melayani penjualan keperluan hidup sehari-hari bagi santri. Baik berupa makanan kecil, lauk untuk makan, alat mandi atau yang lainnya.

---

<sup>185</sup> Nur Syam, *Penguatan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pesantren*, dalam A.Halim, et.al (ed)., *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, hlm. 249.

<sup>186</sup> Ibid.

Selain tiga kekuatan diatas, aksesibiliti pesantren terhadap lembaga diluarnya juga sangat terbuka.<sup>187</sup> Meskipun begitu tentu sahaja ini sangat terkait erat dengan daya saing, kemampuan komunikasi dari komponen didalam pesantren (terutama kiai), dan sejarah pesantren tersebut. Kemampuan pesantren untuk berdialog dengan lembaga-lembaga di luarnya, apakah institusi pemerintah ataupun institusi lainnya merupakan salah satu cerminan dari sifat pesantren yang selalu responsif terhadap perubahan. Tak hanya dengan lembaga, dalam beberapa kes, pesantren bahkan berhubungan secara baik dengan individu yang memiliki kemampuan dalam ekonomi mahupun pengurusan pengembangan ekonomi.

Kekuatan sebagai institusi sosial ini, tentu boleh dimanfaatkan pesantren untuk menjadi sebuah lembaga ekonomi rakyat. Dan dalam konteks inilah pesantren dapat menjadi media pemberdayaan masyarakat. Mesti disedari, bahawa setelah kegagalan sistem ekonomi konglomerasi, maka harapan itu ditumpahkan ke lembaga-lembaga rakyat yang sudah teruji dan lulus dalam sejarah kehidupan masyarakat dan berbangsa.<sup>188</sup> Ternyata, yang justeru tahan ditengah badai krisis ekonomi ialah lembaga-lembaga ekonomi mikro yang berbasis rakyat. Industri kelas menengah dan kecil seperti *home industry* justru memiliki daya kekuatan ketika berhadapan dengan krisis multidimensional ini.

Pesantren, seperti yang dapat dibaca dalam kehidupan keseharian didiami oleh santri yang bermukim dengan jumlah yang cukup banyak sehingga merupakan pengguna yang positif. Selain itu, pesantren juga disokong oleh masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, santri dan masyarakat sekitar pada dasarnya ialah

---

<sup>187</sup> Ibid.

<sup>188</sup> Ibid.

pengguna yang keperluannya dapat dicukupi secara ekonomi oleh pesantren. Jadi pesantren hakikatnya boleh menjadi pusat kelembagaan ekonomi, bagi warganya, didalam maupun diluar pesantren.<sup>189</sup>

Dalam kehidupannya, pesantren memiliki beberapa model pengembangan *networking*.<sup>190</sup> Yang biasa terlihat dalam kehidupan keseharian masyarakat ada enam model pembangunan *networking* yang cukup memberikan keleluasaan bagi pesantren dalam berkomunikasi dengan dunia luar. Beberapa *networking* tersebut antara lain, *networking* model pemberdayaan masyarakat luar pesantren, *networking* model kerja sama pesantren dengan dunia usaha, *networking* model korporasi, *networking* model kerjasama antar pesantren, *networking* model kerja sama dengan pemerintah dan *networking* model kerja sama dengan NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pesantren pada kenyataannya ialah lembaga yang berpotensi untuk bergerak ke arah ekonomi berbasis rakyat sebagaimana kekuatan yang dimilikinya. Jika pesantren tidak bergerak ke arah ini, maka pesantren hanya akan menjadi penonton di era yang akan datang, ketika lembaga-lembaga ekonomi mikro lain bergerak ke arah kemajuan. Oleh kerana itu, diperlukan analisis yang cermat untuk melakukan penguatan kelembagaan ekonomi ini, agar tidak salah melangkah.<sup>191</sup>

Kalau dilihat dari pelbagai model *networking* diatas, maka pesantren tengah berupaya untuk membangun *networking* dengan model pemberdayaan masyarakat. Dengan model ini pesantren menempatkan masyarakat sebagai rakan kongsi atau

---

<sup>189</sup> Ibid., hlm. 248.

<sup>190</sup> Ibid., hlm. 249.

<sup>191</sup> Ibid.

mitra kerja pesantren. Pesantren biasanya tidak menarik keuntungan dari kegiatan masyarakat, tetapi lebih memposisikan diri sebagai motivator bagi masyarakat.

Model ini, meski seolah kehilangan pendapatan tetapi pesantren mendapatkan keuntungan, yaitu berupa tumbuhnya rasa memiliki pesantren oleh masyarakat. Keselamatan pesantrenpun menjadi terjamin. Di samping itu, pesantren menjadi mudah ketika meminta elemen masyarakat untuk membantu pesantren.<sup>192</sup> Dengan model inilah sebenarnya akar untuk melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren dapat tumbuh subur.

Dalam “Menelusuri Jejak Pesantren,” Suisanto mengatakan bahwa ketika melakukan pemberdayaan masyarakat, pesantren setidaknya memiliki tiga motif.<sup>193</sup> *Pertama*, motif keagamaan, kerana kemiskinan bertentangan dengan etika sosial ekonomi Islam. *Kedua*, motif sosial, kerana kiai juga seorang pemimpin yang mesti mengatasi krisis ekonomi setempat. *Ketiga*, motif politik, karena pemegang kekuasaan setempat mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi pada tingkat mikro dan makro. Dalam fungsinya untuk melayani masyarakat, dapat pula dilihat dari upayanya dalam melayani masyarakat, terutama keperluan untuk menanggapi persoalan-persoalan kemiskinan, membentaras kebodohan, menciptakan kehidupan yang sihat dan sebagainya.<sup>194</sup>

Melihat keperluan yang begitu jelas, maka dapat dipastikan pesantren memiliki peran dalam konteks ini. Disini, kita dapat melihat betapa pentingnya kehadiran

---

<sup>192</sup> Muhammad Chirzin, *Modul Pengembangan Pesantren Untuk Pengasuh Pesantren*, Yogyakarta: Puskadiabuma, 2006, hlm. 219.

<sup>193</sup> Suisanto, *Menelusuri Jejak Pesantren*, Yogyakarta: Alief Press, 2004, hlm. 78.

<sup>194</sup> Sasono, Adi, et.al., *Solusi Islam Atas Problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hlm. 120.



pesantren. Mereka hadir sebagai institusi yang tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri tetapi juga kepentingan masyarakat sekitar lebih mendapat tempat dalam kerangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik zahir maupun batin.<sup>195</sup> Hal ini penting untuk dipahami karena pesantren secara historis didirikan dari dan untuk masyarakat. Pesantren didirikan dengan tujuan mengadakan transformasi sosial bagi (masyarakat) daerah sekitarnya. Ia hadir mengabdikan dirinya mengembangkan dakwah Islam dalam pengertian luas, mengembangkan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan pada gilirannya disokong secara penuh oleh mereka.<sup>196</sup>

Aspek lain kepentingan penglibatan pesantren dalam pemberdayaan masyarakat berpeluang pada kenyataan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas terdiri dari komunitas muslim pada umumnya daerah perkampungan. Pada sisi itu, pesantren yang memang berkembang dan tersebar di daerah-daerah perkampungan sampai derajat tertentu, merupakan representasi dari masyarakat muslim daerah-daerah perkampungan.<sup>197</sup>

Kenyataan itulah yang membuat pesantren sampai saat ini masih berpengaruh pada hampir seluruh aspek kehidupan di kalangan masyarakat muslim perkampungan yang taat. Tetapi upaya untuk menuju ke arah pemberdayaan masyarakat melalui fungsi ekonomi pesantren terkadang dibenturkan dengan pelbagai kenyataan yang dapat menjadi penghambat langkah tersebut. Salah satu contohnya ialah kerana biasanya pesantren selalu menjadi tempat bagi keluarga dekat kiai, seperti anak, cucu dan seterusnya atau biasa disebut *dzurriyyah* kiai.

---

<sup>195</sup> A. Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, Yogyakarta: LKPSM, 1995, hlm. 126

<sup>196</sup> Abd A'la, *Pembaruan Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006, hlm. 47.

<sup>197</sup> Ibid.

Mereka kadang bertumpu secara ekonomi terhadap santri, apakah dalam bentuk penyediaan makanan, bahan keperluan sehari-hari, atau yang lainnya.

Di kebanyakan pesantren selalu terdapat gerai-gerai kecil milik keluarga kiai yang terkadang menjadi tumpuan ekonomi keluarga.<sup>198</sup> Inilah susahnya ketika pesantren kemudian mencoba untuk memusatkan kegiatan ekonomi dalam satu lembaga. Kegagalan koperasi Pondok pesantren pada dasarnya adalah kerana usaha itu dihadang oleh kepentingan-kepentingan dalaman. Selain itu harus diakui bahawa pengurusan ekonomi pesantren juga relatif kurang baik, bukan dari aspek kejujurannya tapi administrasinya.

Selain itu kekurangan juga kerap tumbuh pada persoalan yang bersifat paradigmatik. Satu contoh misalnya nilai-nilai kemandirian yang dianut pesantren masih lebih menampakkan aspeknya yang bersifat individual, atau sangat lokal dan belum menjadi sikap sosial kemasyarakatan yang transformatif.<sup>199</sup> Persoalan itu ditambah dengan pemaknaan sebahagian pesantren terhadap pengabdian dan pengembangan masyarakat yang masih terkesan sebahagian atau parsial dan hanya ditekankan pada aspek pengembangan keilmuan keagamaan murni.

Sebagai konsekuensi pemberdayaan masyarakat di kalangan pesantren belum disentuh secara kreatif dan serius dalam bentuk penyatuan yang bersepadu dan eksplisit ke dalam kurikulum yang dikembangkan pesantren. Tradisi itu tidak cukup dalam dirinya sendiri untuk memetamorfosis sebagai nilai *civil society* yang berkeadaban, universal dan berorientasi jauh ke hadapan. Untuk menambal

---

<sup>198</sup> Ibid.

<sup>199</sup> Ibid., hlm. 49.

kekurangan tersebut, maka yang harus diperhatikan dalam penguatan kelembagaan itu antara lain adalah.<sup>200</sup> *Pertama*, menganalisis keperluan subjek sasaran ekonomi atau yang disebut sebagai *need-assessment*. Analisis keperluan ia diperlukan agar apa yang akan dipasarkan itu memang menjadi keperluan sasaran. Pada tahap awal tentunya harus disasarkan keperluan santri dan masyarakat sekitar, agar produk yang ditawarkan akan segera diperoleh nilai imbal balik. Baru boleh bergerak ke sektor yang lain, jika keadaan memang sudah memungkinkan.

*Kedua*, melakukan analisis potensi SDM untuk kegiatan (ekonomi) tersebut. Apakah sudah ada SDM yang boleh dan mampu untuk menjadi agen bagi pengembangan kelembagaan ekonomi pesantren tersebut? Pesantren sesungguhnya kaya dengan sumber manusia yang berkualiti, hanya sahaja belum disentuh dengan kekuatan maksimal untuk itu.

*Ketiga*, memetakan keperluan dan potensi untuk dijadikan sebagai rancangan program yang memadai. *Keempat*, melaksanakan program dengan memperhatikan jaringan kerja atau *networking* yang telah dimiliki oleh pesantren. *Kelima*, melakukan evaluasi prestasi kerja apakah sudah ada kemajuan atau belum?.<sup>201</sup>

Strategi tersebut sebenarnya boleh diwujudkan dalam pelbagai ranah. Kerana pesantren pada umumnya berada di kawasan perkampungan, maka strategi yang tepat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat haruslah tidak jauh dari bidang

---

<sup>200</sup> Ibid., hlm. 50

<sup>201</sup> Ibid.

tersebut. Sunyoto Usman memberikan beberapa pilihan wilayah yang boleh menjadi wilayah penerokaan pesantren dalam rangka pemberdayaan masyarakat.<sup>202</sup>

Program-program pembangunan perkampungan tersebut antara lain terkemas dalam apa yang disebut dengan istilah (1) pembangunan pertanian (*agricultural development*). Matlamat yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian ialah memperbaiki keadaan kehidupan masyarakat kampung dengan cara meningkatkan *output* dan pendapatan mereka. (2) industrialisasi perkampungan (*rural industrialization*). Matlama utama program industrialisasi perkampungan ialah mengembangkan industri kecil dan kraf tangan. (3) pembangunan masyarakat kampung terpadu (*integrated rural development*). Tujuan utama program pembangunan masyarakat kampung terpadu ialah meningkatkan produktiviti, memperbaiki kualiti hidup penduduk perkampungan serta memperkuat kemandirian. (4) strategi pusat pertumbuhan (*growth centre strategy*).<sup>203</sup>

Cara yang ditempuh dalam strategi ini biasanya dengan cara membangun atau mengembangkan sebuah pasar di suatu kampung. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi kampung, sekaligus sebagai pusat maklumat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehendak pengguna dan kemampuan produsen.<sup>204</sup>

Apakah ada konteks yang menyambungkan antara keperluan ekonomi pesantren dengan peran serta fungsi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam membangun kemandirian ekonomi? Pertanyaan ini yang akan dielaborasi

---

<sup>202</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 40

<sup>203</sup> Ibid.

<sup>204</sup> Ibid.

berdasarkan pengalaman beberapa pesantren serta fungsi yang dijalankan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Provinsi Lampung mulai dari era reformasi hingga tahun 2014.

Seperti yang digambarkan diatas, bahawa pesantren memiliki akses dengan lembaga-lembaga di luarnya, apakah institusi pemerintah ataupun institusi lainnya. Salah satu institusi tersebut adalah parti politik. Posisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam konteks ini cukup unik. Mereka adalah lingkaran “luar” sekaligus “dalam” pesantren. Dikatakan luar, kerana identiti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan sebuah institusi politik. Kapasiti ini yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pesantren. Tidak ada hubungan langsung antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai institusi politik dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan.<sup>205</sup> Meskipun begitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga dapat diidentifikasi sebahagai orang dalam, kerana mereka yang ada di dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hampir sebahagian besar adalah alumni pesantren. Hubungan ini tetap terjaga kerana mereka yang keluar dari pesantren akan tetap menjaga komunikasinya dengan pesantren. Bahkan banyak keluarga pesantren yang ada di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sudah banyak difahami bahawa keperluan di pesantren banyak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Hampir dapat dipastikan keperluan santri selalu berkaitan dengan hal yang bersifat ekonomi. Dari kebanyakan yang dilakukan pesantren, upaya tersebut selalu dicarikan solusinya oleh pihak pesantren sendiri dengan mengandalkan kekuatan yang ada dalam diri mereka. baik dengan memanfaatkan

---

<sup>205</sup> Temu Bual Amin Thohari, 11 Mei 2013.

jaringan yang dimiliki oleh kiai, memberdayakan wali santri yang memiliki kelebihan dalam bidang materi. Tak sedikit juga yang memiliki hubungan dengan pemerintah dan memanfaatkan dana yang ada di pemerintah untuk membantu pesantren.<sup>206</sup>

Tentang hal tersebut, beberapa kiai di Lampung mengaku masih merasakan minimnya akses kepada anggaran-anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Kiai Ahmad Karimullah misalnya mengatakan bahwa sejatinya perhatian dari pemerintah itu tetap ada. Bagi pesantren yang sudah kenal dengan pejabat pemerintah, maka akses dana kepada mereka relatif lebih mudah. Tapi kalau yang tidak kenal pesantren, susah untuk memperoleh dana tersebut.<sup>207</sup>

Perhatian pemerintah terhadap institusi pesantren masih bertumpu pada kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian Agama.<sup>208</sup> Melalui Bidang Pondok Pesantren, Kementerian Agama menyediakan bantuan untuk pesantren baik berupa peralatan mahupun untuk pembangunan fisik. Sebagai wakil pemerintah, hanya dari mereka inilah boleh dikatakan pesantren mendapatkan sokongan dana. Sementara, parti politik tidak ikut memberikan sumbangan.

Ali Mun'im menuturkan, sebagai pimpinan pondok pesantren, ia sendiri sebenarnya sering mengkritik pesantren dalam soal kemandirian ekonomi. Menurutnya, perkembangan pesantren akan berkembang cepat jika ia ditopang oleh

---

<sup>206</sup> Ibid.

<sup>207</sup> Temu bual Ahmad Karimullah, 9 Mei 2013.

<sup>208</sup> Temu bual Syaikhul Ulum, 9 Mei 2013.

institusi pendidikan formal.<sup>209</sup> Susah bahagi pesantren salaf untuk berkembang jika hanya mengandalkan pesantren sahaja, tanpa sekolah.

Masalahnya ialah hampir dikebanyakan pesantren lebih dari separuh santrinya datang dari kalangan orang yang kurang mampu. Banyak orang tua yang ingin memasukan anaknya ke pesantren tapi tidak ada biaya.<sup>210</sup> Jadi ada sebahagian santri yang pasrah pada kiai bagaimana caranya anak ini agar boleh belajar di sini tanpa bayaran. Situasi itu kemudian mendorong banyak dari santri yang kemudian keluar dari pesantren sebelum menghabiskan pengajian kerana persoalan biaya tadi. Makanya salah satu yang harus juga diajarkan di pondok itu adalah tentang pendidikan wirausaha, pertanian, perikanan, yang diramu dalam program kewirausahaan.<sup>211</sup>

Pemberian bekalan keterampilan dalam berwirausaha itu memang tidak berbuah langsung dalam jangka waktu yang pendek.<sup>212</sup> Matlamat minimnya ialah untuk mengurangi agar santri santri tidak *boyong* (keluar dari pesantren, red) lebih awal. Dengan demikian, mereka dapat bertahan di pesantren sambil belajar mendalami ilmu agama. Ini adalah bahagian dari upaya untuk juga menampung santri yang tidak memiliki biaya sama sekali.

Jika dalam pelatihan ada proses pengawasan dan evaluasi selepas pelaksanaan kegiatan, maka pesantren memiliki mekanisme informal dalam proses pengawasan

---

<sup>209</sup> Temu bual Ali Mun'im, 22 September 2013.

<sup>210</sup> Ibid.

<sup>211</sup> Ibid.

<sup>212</sup> Ibid.

serta evaluasi.<sup>213</sup> Pengawasan itu yang menjadi ukuran sederhana apakah kegiatan yang dilakukan oleh pesantren memiliki dampak ataupun tidak terhadap kemandirian santri. Mekanisme yang digunakan untuk melakukan evaluasi itu ada dalam pertemuan alumni yang dilaksanakan setiap akhir tahun persekolahan. Dalam forum itu santri menyampaikan perkembangannya, baik yang terkait dengan kehidupan peribadinya, karir maupun aktivitas lain setelah menamatkan pendidikan di pesantren. Selain itu ada santri yang secara khusus datang ke pengasuh pesantren untuk memberitahukan keadaan terkini dari kehidupannya.

Dalam pertemuan alumni itu sering muncul banyak ide untuk pengembangan pesantren ataupun alumninya. Salah satunya seperti diungkapkan oleh Laily Masyithoh adalah keinginan untuk mendirikan koperasi alumni.<sup>214</sup> Meski belum jelas bagaimana bentuk dari koperasi tersebut, maksud dari pendiriannya sebenarnya cukup jelas, yaitu untuk membangun ikatan diantara sesama alumni pesantren.

Kemandirian dalam membangun sistem ekonomi seperti gambar di atas itu sejatinya menjadikan pesantren sudah boleh berdikari. Meski begitu, relasi dengan institusi di luar pesantren termasuk pemerintah tetap dijaga. Menurut Ali Mun'im, pesantren yang diasuhnya tetap terbuka untuk bekerjasama dengan pemerintah. Ia mengatakan "kami tetap juga mengajukan proposal, ada juga kerjasama yang muncul dari inisiatif pondok sendiri kemudian diajukan ke pemerintah juga ada."<sup>215</sup>

Sementara, hubungan dengan partai politik juga tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan hal tersebut. Tetapi, kata Ali, hubungan pesantren dengan partai

---

<sup>213</sup> Ibid.

<sup>214</sup> Temu bual Laily Masyithoh, 22 September 2013.

<sup>215</sup> Temu bual Ali Mun'im, 22 September 2013.



politik sifatnya peribadi, tidak mewakili institusi pesantren.<sup>216</sup> Sementara pesantren sendiri sedapat mungkin tetap terjaga independensinya.

Sebagai institusi yang berdiri di tengah masyarakat, kewujudan pesantren akan terasa jika mereka memberi sumbangan terhadap lingkungan sekitarnya. Di pesantren yang diasuh oleh Ali Mun'im selain bersama-sama dalam kegiatan rutin keagamaan (Tahlil dan membaca Surat Yasin), warga masyarakat dan pesantren bekerjasama dalam pengembangan beternak lembu. Selain itu, kantin yang ada di pesantren bahan makanannya berasal dari warga masyarakat yang mengisinya.<sup>217</sup> Kehadiran warga masyarakat di pesantren juga ada dalam bentuk keterlibatannya di kegiatan-kegiatan pembangunan fisik pesantren.<sup>218</sup>

Secara umum, menurut Qudratullah Shodiq, pengembangan basis ekonomi di pesantren yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memang belum berkembang di masa awal reformasi.<sup>219</sup> Tahun 1999-2009 peran PKB belum begitu terasa di pesantren dalam konteks ekonomi. Kehadiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di pesantren lebih banyak dalam kapasitasnya sebagai institusi politik yang memerlukan undi yang banyak. Pesantren dalam situasi itu lebih dimaknai sebahagai kekuatan massa yang loyal dan sangat diperlukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari sisi ekonomi, peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memang belum terasa. Agak mula dirasakan itu selepas tahun 2009 meski hal itu terhadap pesantren yang memiliki kedekatan dengan parti atau anggota DPR. Biasanya mereka memberikan sejenis pelatihan kewirausahaan di pesantren.

---

<sup>216</sup> Ibid.

<sup>217</sup> Temu bual Laily Masyitoh, 22 September 2013.

<sup>218</sup> Temu bual KH. Baedhowi, 22 September 2013.

<sup>219</sup> Temu bual Qudratullah Shodiq, 21 September 2013.

Dalam kapasitasnya sebagai ahli jawatan kuasa parti, Shodiq mengatakan bahawa pemberian pelatihan wirausaha di pesantren cukup penting. Apatahlagi bendera PKB relatif masih dapat diterima oleh kalangan pesantren yang masih sangat kuat nuansa tradisionalnya. Tentu sahaja dalam proses itu parti akan memilih mana pesantren yang memang telah menjadi basis dan tidak. Pelatihan-pelatihan dengan membawa bendera PKB secara terbuka sangat dimungkinkan.<sup>220</sup>

Di Lampung, penguatan terhadap sisi ekonomi ini sangat penting kerana banyak sekali konflik di peringkat horizontal yang diawali oleh jurang ekonomi. Dampaknya, konflik ekonomi itu kemudian menjalar pada sentimen antar suku yang sangat menguat. Persaingan antar suku Jawa dan Lampung misalnya, cukup mengakar.<sup>221</sup> Kalau sahaja dua suku itu berbeza secara agama, konflik bernuansa suku sangat mudah disulut. Hal itulah yang terjadi ketika konflik Bali-Lampung di Balinuraga. Meski pada dasarnya konflik ini adalah persoalan jurang ekonomi, akan tetapi persoalan kemudian merambat menjadi konflik etno-religi. Dalam situasi seperti ini, para kiai sentiasa menjadi penengah atau mediator ketika terjadi konflik. Para kiai ini datang kepada ketua adat dan kemudian berbicara tentang perdamaian. Di Metro, pesantren yang kiainya sudah membangun hubungan secara adat, relatif lebih mendapatkan citra yang baik di masyarakat.

Dengan melihat gambaran di atas, maka dapat disimpulkan bahawa peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam konteks pengembangan ekonomi tidak tampak. Jika ada, masih sangat terhad di lingkungan pesantren yang menjadi basis

---

<sup>220</sup> Ibid.

<sup>221</sup> Temu bual Mahrus As'ad, 21 September 2013.

suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebenarnya ini merupakan bahagian dari pilihan parti itu sendiri, mengingat, keterbatasan yang juga dimiliki oleh parti.<sup>222</sup>

Kemudahan yang diberikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap pesantren biasanya ada dalam bentuk kursus. Disini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) biasa memainkan peran. *Pertama*, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyalurkan bantuan atau berjuang memasukan pesantren agar mendapatkan bantuan untuk melaksanakan kursus pelatihan dari anggaran yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. *Kedua*, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sendiri yang melakukan kursus tentang kemandirian ekonomi di pesantren.<sup>223</sup>

Terhadap fungsi kedua, mesti diakui sangat kecil sekali peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam melakukan kegiatan tersebut. Tidak banyak pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di lingkungan cawangan (kabupaten/kota) atau wilayah (provinsi) di Provinsi Lampung yang melakukan kerja-kerja demikian. Selain karena Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) relatif parti kecil dalam skema politik Lampung, juga kesadaran untuk melakukan hal demikian masih belum muncul. Keperluan utama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Lampung pada fasa 1999-2009 adalah membangun sistem yang mapan. Yang utama, dan tentu sahaja dalam usahanya menegaskan jatidiri organisasi, memperkokoh struktur, penguatan ideologi parti serta meminimumkan konflik yang selalu datang mengintai. Maka dari itu peran untuk menguatkan ekonomi pesantren belum menjadi keutamaan.<sup>224</sup>

---

<sup>222</sup> Ibid.

<sup>223</sup> Temu bual Ali Mun'im, 22 September 2013.

<sup>224</sup> Temu bual Qudratullah Shodiq, 21 September 2013.

Jika dibandingkan dengan fungsi sosial dan fungsi politik, fungsi ekonomi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) inilah yang tidak terlalu banyak terasa.<sup>225</sup> Hanya beberapa pesantren sahaja yang melihat bahawa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berperan dalam fungsinya yang pertama iaitu (memperjuangkan keperluan untuk memperoleh peruntukan pemerintah). Pesantren yang merasa ada peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, banyak yang berasal dari kalangan pesantren yang menunjukkan sokongannya secara terbuka kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

### **Fungsi Perekrutan: Rekrutmen Warga Pesantren untuk Membangun Kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Lampung**

Meski era terus berganti, tapi pesantren tetap memainkan perannya. Tak hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi pesantren juga menjadi agen perubahan sosial. Tak hanya itu, pesantren juga memainkan fungsi-fungsi politik. Meski di setiap era, peran politik yang dijalankan oleh pesantren memiliki langgam dan warna yang berbeza-beza.

Ketika Indonesia memasuki era keterbukaan pada tahun 1998, pesantren sebagai basis sosial warga Nahdliyyin, turut aktif dalam momen politik. Nahdlatul Ulama (NU) yang membidani lahirnya Parti Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah organisasi masyarakat yang menjadi afiliasi warga pesantren. Tak heran jika di awal pendirian, semangat warga pesantren untuk membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) begitu besar.<sup>226</sup>

---

<sup>225</sup> Ibid.

<sup>226</sup> Temu Bual Syamsudin Thohir, 21 September 2013.

Di Lampung, sambutan terhadap kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberangsangkan. Amin Tohari, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur tahun 1999-2004 sekaligus salah satu deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setempat menggambarkan heroisme warga pesantren ketika kali pertama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditubuhkan.

“Alhamdulillah waktu pertama lahirnya PKB dibadani oleh NU. Jadi kalau *gak* ada NU PKB *gak* lahir. Dan wakil wakil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini jelas otomatis orang-orang yang berakidah *ahlusunnah wal jama'ah*. Dulu kita pernah dapat 7 kursi (di DPRD Lampung Timur) waktu awalnya reformasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). *Gak* perlu repot-repot, kampanye dibiayai masyarakat, kaos juga *gak* dibagi tapi dijual. Sampai periode kedua (2004-2009) masih seperti itu (baca: solid)”.<sup>227</sup>

Amin Thohari melanjutkan, ketika itu di Lampung tidak ada pesantren yang apolitis.<sup>228</sup> Semuanya hampir menyokong penuh kehadiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pesantren kemudian menjadi basis politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sangat diperhitungkan. Jangkar suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ada di pesantren sebagai lapisan inti. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Lampung menjadikan pemimpin teras NU sebagai bahagian dari team 5, team yang ditugaskan untuk membentuk kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di provinsi tersebut. Salah seorang dari team 5 ketika itu ialah KH. Khusnan Musthofa Ghufron, Ketua PWNU Lampung (hingga tahun 2001) sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul A'mal, Metro Lampung.

Qudratullah Shodiq, putera almarhum KH. Khusnan Musthofa Ghufron menambahkan bahawa pengorbanan warga pesantren saat Partai Kebangkitan

---

<sup>227</sup> Temu bual Amin Thohari, 11 Mei 2013.

<sup>228</sup> Ibid.

Bangsa (PKB) dideklarasikan begitu sangat kuat terasa. Bahkan ia sendiri hampir mengalami kecelakaan ketika perjalanan untuk menghadiri sebuah musyawarat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).<sup>229</sup>

Penegasan bahawa afiliasi politik pesantren pada era 1999 hampir semuanya berkiblat kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disampaikan oleh KH. Syamsudin Thohir, salah seorang anggota team 5 penubuhan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Lampung Timur.

“Saya rasa di Lampung itu masih belum ada pesantren yang bukan NU, dan milih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kalau ada kampanye Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (saat itu) ya keluar semua. Ada perubahan setelah ada konflik, ini semakin *ngambang* tapi di sini bukan hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saja, semuanya”.<sup>230</sup>

Dahaga politik yang begitu terasa pada era orde baru, kemudian mendapat penawarnya. Bagi warga pesantren di Lampung ketika itu, jika mengaku bahagian dari keluarga NU mesti memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Thohir melanjutkan.

“Kalau kamu tidak pilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dianggap bukan NU, saya merasakan betul, sehingga kita melepaskan pemimpin apakah dia berjuang apa tidak, tapi malah NU atau tidak. Tidak hanya di Lampung Tengah, tapi Lampung Utara juga Lampung Selatan”.<sup>231</sup>

Jika dipetakan, di Lampung ada beberapa pesantren dengan jumlah santri yang cukup besar. Selain Darus Salamah pimpinan KH. Ahmad Sodiq, ada pesantren Darul A'mal (K.H. Khusnan Mustofa Ghufroon, Metro), Darus Sa'adah (K.H. Muchsin Abdillah, Lampung Tengah), Darun Najah, (K.H. Sahlan, Lampung Timur), Tribakti At-Taqwa (Lampung Timur), Nurul Ulum (KH. Ngaliman Marzuqi,

---

<sup>229</sup> Temu bual Quadratullah Shodiq, 21 September 2013.

<sup>230</sup> Temu bual KH. Syamsuddin Thohir, 21 September 2013.

<sup>231</sup> Ibid.

Lampung Tengah), Roudlatus Sholihin (KH. Jamaluddin al Busthomi, Lampung Tengah) dan lainnya. Pada awal reformasi, pesantren-pesantren inilah yang menjadi basis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).<sup>232</sup>

Dilihat dari sudut pandang geografis, ada dua wilayah dimana pesantren terlihat begitu kuat iaitu, Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur. Posisi kerana basis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah pesantren, maka kekuatan inilah yang berbanding lurus dengan dengan perolehan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sama ada untuk suara di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI di Pilihan raya umum (Pemilu) tahun 1999 dan 2004.<sup>233</sup>

Dalam hasil pemilu 1999 di peringkat kabupaten se-Lampung, kita dapat melihat bahawa Lampung Tengah dan Timur cukup memperoleh hasil yang memuaskan untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (lihat Lampiran 1). Di Lampung Tengah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi parti ketiga terbanyak dalam perolehan undi dan menjadi peraih suara kedua terbanyak di Lampung Timur dengan meraih 7 kerusi dan menghantarkan Ismail Sonjaya sebagai Ketua DPRD Lampung Timur.

Pada pilihan raya umum tahun 2004 (lihat Lampiran 2), suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Lampung Tengah dan Timur masih cukup kuat. Di Kabupaten Lampung Timur, suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih utuh seperti tahun sebelumnya iaitu 7 kerusi. Namun, di beberapa tempat lain seperti Kota Bandar Lampung parti berlogo bintang sembilan ini hanya mendapatkan satu

---

<sup>232</sup> Ibid.

<sup>233</sup> Semua hasil rekapitulasi Pemilu di Lampung yang ada dalam karya ini bersumber dari [www.pemilu.asia](http://www.pemilu.asia) . Diakses pada tanggal 15 April 2013, 17 Juli 2013 dan 11 Oktober 2013.

kerusi. Apalagi ketika itu muncul kekuatan baru iaitu, Parti Demokrat yang ditubuhkan oleh Soesilo Bambang Yudhoyono yang kemudian terpilih menjadi Presiden pada pilihan raya umum 2004.

Perolehan undi yang cukup besar juga didapat untuk DPRD Provinsi Lampung. Pada tahun 1999, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Lampung memperoleh 8 kerusi dan tahun 2004 turun menjadi 6 kerusi. Dan jika dilihat dari daerah asal pemilihannya, maka daerah pemilihan Lampung IV (Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro) dan Lampung V (Kabupaten Lampung Tengah) yang memberikan suara cukup signifikan dalam pemilihan anggota legislatif provinsi (lihat Lampiran 3). Pada pemilu 2009, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih 5 kursi untuk DPRD Provinsi Lampung. Perolehan lengkapnya bisa dilihat pada Lampiran 4 dan Lampiran 5.

Cerita kejayaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai parti yang baru juga tersaji di pemilihan anggota DPR RI. Tahun 1999 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengirimkan dua wakilnya ke senayan sebagai anggota DPR RI iaitu Umar Anshori (putera KH. Khusnan Musthofa Gufro) dan Imam Mawardi Sanjaya. Sementara tahun 2004, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung hanya diwakili oleh satu orang, Ahmad Syafrin Romas. Pada Pilihan raya umum tahun 1999, daerah pemilihan di Provinsi Lampung masih satu. Pemilu berikutnya, daerah pemilihan dibahagi ke dalam dua daerah, Lampung I (Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, Kab. Tanggamus, Kota Bandar Lampung) dan II (Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara Kab. Tulang Bawang, Kab. Way Kanan, Kota Metro). Syafrin Romas terpilih dari daerah



pemilihan dimana Lampung Tengah dan Timur berada iaitu daerah pemilihan Lampung II (lihat Lampiran 6).

Seperti halnya pada tahun 2004, pada pemilu 2009 pun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih tetap bisa mengirimkan wakilnya sebagai anggota DPR. Meski saat itu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah didera konflik, namun konsistensi mereka tetap terjaga (lihat Lampiran 7).

## **Penutup**

Fungsi parti politik, selari dengan apa yang disampaikan Neumann ada empat hal; agregasi, pendidikan, artikulasi dan perekrutan. Dalam konteks fungsi agregasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cukup terlihat sebagai instrument transformasi sosial pesantren. Dalam lingkup fungsi pendidikan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga melakukan edukasi terhadap kalangan pesantren meski mungkin masih terbatas pada santri senior atau keluarga pesantren. Hal ini terlihat jelas ketika berbicara soal perekrutan. Pesantren atau komponen yang berelasi dengan pesantren, selalu menjadi pilihan utama dalam melakukan rekrutmen untuk calon anggota legislatif atau eksekutif. Yang barangkali terlihat tidak terlalu kuat ada pada fungsi artikulasi, khususnya ketika melihat peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam membangun kemandirian ekonomi pesantren. Satu-satunya hal yang paling mungkin dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai kekuatan politik adalah mengawal anggaran yang menunjukkan keberpihakan pada pesantren.